



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN







KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima dalam masa RENSTRA Tahun 2021 - 2026. LKj Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2021 - 2026).

LKj Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan LKj Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Pangkajene, 28 Februari 2026

Kepala Dinas Kesehatan



Hj. Herlina, S. Si., Apt., M. Kes

Nip. 19670515 199803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK/GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sistematika Laporan	1
1.2.1. Maksud dan Tujuan	1
1.2.2 Sistematika Laporan	2
1.2.3 Landasan Hukum	3
1.3 Gambaran Umum Organisasi	
1.3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.3.2 Sumber Daya Organisasi	8
1.3.3 Isu Strategis Organisasi	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	16
2.1.1. Tujuan dan Sasaran	17
2.1.2 Program dan Kegiatan	23
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	24
2.3.Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026	24
2.4 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Tahun 2025	25
2.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2025	25
2.6 Rencana Anggaran Tahun 2025	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Pengukuran Kinerja	28
3.2 Analisis Capaian Kinerja	30
3.2.1 Capaian Kinerja berdasarkan IKU Tahun 2025	30
3.2.2 Perbandingan berdasarkan IKK Tahun 2025	31
3.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2026)	34
3.2.4 Analisis Capaian Kinerja	35
3.2.5 Capaian SPM Bidang Kesehatan	90
3.3 Capaian Keuangan	101

3.4 Analisa Efisiensi

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1. Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

102

104

106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3	Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	8
Tabel 1.4	Komposisi ASN PPPK PW Menurut Jenjang Pendidikan Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	10
Tabel 1.5	Komposisi SDM ASN Berdasarkan Gender Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	11
Tabel 1.6	Komposisi SDM ASN PPPK PW Berdasarkan Gender Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	12
Tabel 1.6	Jenis dan Jumlah Peralatan Kantor Dinas Kesehatan Tahun 2025	13
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategik Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan 2021 - 2026	17
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan	17
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025	18
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	23
Tabel 2.5	IKU Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026	24
Tabel 2.6	IKK Dinas Kesehatan Tahun 2025	24
Tabel 2.7	SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025	25
Tabel 2.8	Rencana Belanja Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	24
Tabel 2.9	Alokasi Anggaran per Sasaran Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan	26
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Tabel 3.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep Tahun 2025	29
Tabel 3.3	Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep	30
Tabel 3.4	Pencapaian Indikator Kinerja berdasarkan IKK Dinkes Tahun 2025	31
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025	34
Tabel 3.10	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 (Meningkatnya Kepuasan dan Derajat Kesehatan Masyarakat) Tahun 2025	35
Tabel 3.12	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2 (Meningkatnya status kesehatan masyarakat) Tahun 2025	36
Tabel 3.13	Capaian Indikator Angka Kematian Ibu	37
Tabel 3.16	Jumlah Kematian Ibu Per Puskesmas Wilayah Kabupaten	41

	Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	38
Tabel 3.17	Capaian indikator Angka Kematian Bayi	42
Tabel 3.20	Jumlah Kematian Bayi Per Puskesmas Wilayah Kabupaten	
	Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	44
Tabel 3.21	Jumlah Kematian Bayi Per Puskesmas Wilayah Kabupaten	
	Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	46
Tabel 3.22	Capaian indikator Prevalensi Stunting Tahun 2025	47
Tabel 3.24	Prevalensi Stunting per Puskesmas Wilayah Kabupaten	
	Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	51
Tabel 3.27	Capaian Kinerja Indikator Program dan Kegiatan pada sasaran	
	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Tahun 2025	52
Tabel 3.34	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3 (Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Kesehatan) Tahun 2025	60
Tabel 3.36	Realisasi IKM Lingkup Dinas Kesehatan Kab, Pangkep Tahun 2025	63
Tabel 3.37	Capaian Kinerja Indikator Program dan Kegiatan pada sasaran	
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Kesehatan	
	Tahun 2025	64
Tabel 3.44	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4 (Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja) Tahun 2025	81
Tabel 3.46	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025	82
Tabel 3.47	Capaian Kinerja Indikator Program dan Kegiatan pada sasaran	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	
	Tahun 2025	83
Tabel 3.52	Capaian SPM Kesehatan Tahun 2025	90
Tabel 3.53	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Pangkep	
	Tahun 2025	101
Tabel 3.54	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Kesehatan	
	Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	102

DAFTAR GRAFIK/GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	7
Gambar 1.2	Komposisi Jenjang Eselon Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	8
Gambar 1.5	Komposisi SDM berdasarkan gender	13
Gambar 3.5	Persentase Pencapaian IKU Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025	32
Gambar 3.6	Capaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025	32
Gambar 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024	33
Gambar 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target dalam Renstra	35
Gambar 3.11	Perbandingan Usia Harapan Hidup Tahun 2020 – 2025 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	36
Gambar 3.14	Capaian indikator Angka Kematian Ibu	37
Gambar 3.15	Perbandingan Angka Kematian Ibu (per 100.000 KLH) Tahun 2022 - 2025	38
Gambar 3.18	Capaian indikator Angka Kematian Bayi Tahun 2025	42
Gambar 3.19	Perbandingan Angka Kematian Bayi (per 1000 KLH) Tahun 2022 - 2025	43
Gambar 3.23	Capaian indikator Prevalensi Stunting	47
Gambar 3.25	Perbandingan Capaian Dinas Kesehatan Indikator Prevalensi Stunting Tahun 2022 - 2025	48
Gambar 3.26	Perbandingan Realisasi Dinas Kesehatan Indikator Prevalensi Stunting Tahun 2022 - 2025	49
Gambar 3.28	Dokumentasi kegiatan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	58
Gambar 3.35	Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 – 2025	60
Gambar 3.36	Dokumentasi kegiatan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Kesehatan	80
Gambar 3.45	Nilai SAKIP Tahun 2022 - 2025	81
Gambar 3.48	Dokumentasi kegiatan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	89

RINGKASAN EKSEKUTIF

Cakupan LKj Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK). Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2025, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 6 (enam) indikator kinerja utama, terdapat 4 (empat) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan dan 2 (dua) indikator yang belum mencapai target. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung - jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat - lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sistematika Laporan

1.2.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKj Dinas Kesehatan Kab.Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kab.Pangkajene dan Kepulauan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan pada pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2.2 Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan uraian tentang tujuan, sistematika laporan, landasan hukum gambaran umum organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini menyajikan isi renstra organisasi, Perjanjian Kinerja tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Anggaran tahun 2025.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini menguraikan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja, perbandingan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, realisasi anggaran serta analisa efisiensi.

1.2.3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2021-2026;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
 13. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan daerah nomor 70 Tahun 2021, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan/urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut di point a, maka Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan peralatan.
5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

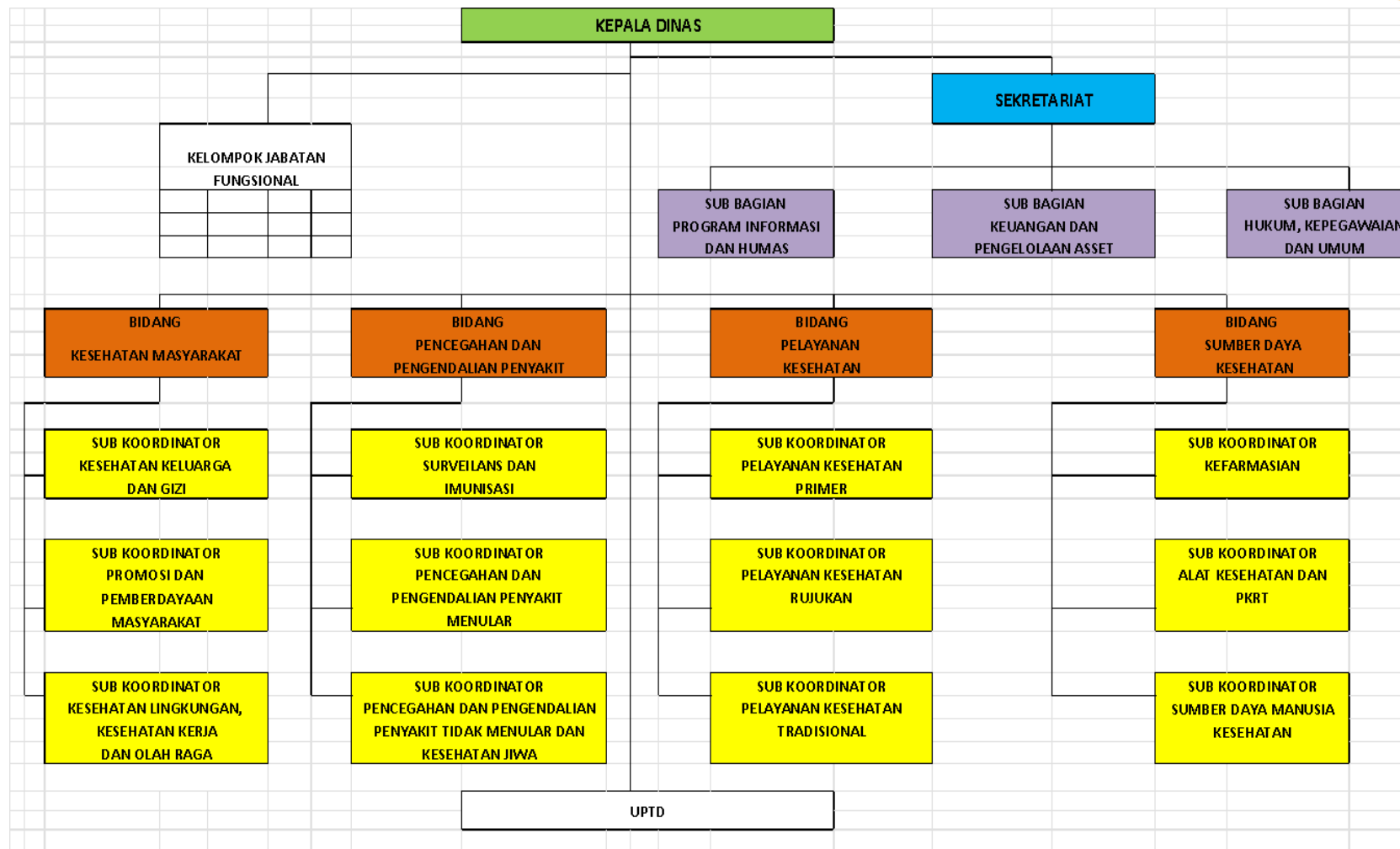
Berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- 1) Sekretariat, yang terdiri atas:
 - a. Sub. Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
 - b. Sub. Bagian Program, Informasi dan Humas
 - c. Sub. Bagian Keuangan dan Aset
- 2) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b. Subkoordinator dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Subkoordinator Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olah Raga
- 3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Surveilans dan Imunisasi
 - b. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - c. Subkoordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- 4) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Primer
 - b. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan rujukan
 - c. Subkoordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 5) Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Kefarmasian

- b. Subkoordinator Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
 - c. Subkoordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 6) UPTD
 - a. 23 puskesmas
 - b. Instalasi Farmasi
 - c. Labkesda
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024



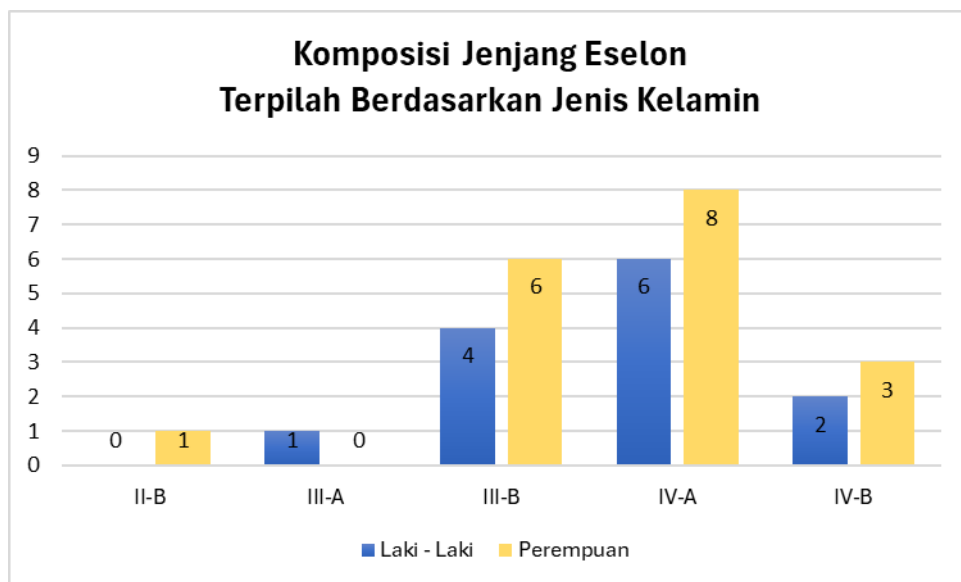
1.3.2 Sumber Daya Organisasi

Sumber Daya Organisasi yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep Per 31 Desember 2025 adalah 1.393 orang yang terdiri 79 orang Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi, 911 orang Puskesmas, 14 orang di Labkesda, 313 di Rumah Sakit Batara Siang, 59 orang di Rumah Sakit Batiling dan 17 orang Rumah Sakit Pratama Sailus. Sedangkan untuk ASN PPPK Paruh Waktu Per 31 Desember 2025 adalah 1.382 orang yang terdiri 28 orang Dinas Kesehatan dan Instalasi Farmasi, 924 orang Puskesmas, 1 orang di Labkesda, 367 di Rumah Sakit Batara Siang dan 62 orang di Rumah Sakit Batiling.

a. Berdasarkan jenjang Eselon

Komposisi sumber daya manusia di Dinas Kesehatan berdasarkan jenjang eselon dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 1.2 Komposisi Jenjang Eselon Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan jenjang eselon di Dinas Kesehatan, dapat di kelompokkan menjadi: Eselon II sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III. A sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III.b sebanyak 10 (sepuluh) orang, Eselon IV.a sebanyak 14 orang dan Eselon IV.b sebanyak 5 orang.

b. Tingkat pendidikan

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN							JUMLAH
		S2	S1 / D4	D3	D1	SMA	SMP	SD	
1	Dinas Kesehatan	17	60	0	0	2	0	0	79
2	Pusk Kota Pangkajene	6	36	8	0	0	0	0	50
3	Pusk Bonto Perak	2	36	17	0	0	0	0	55
4	Pusk Minasatene	3	34	6	0	0	0	0	43
5	Pusk Kalabbirang	2	26	8	0	0	0	0	36
6	Pusk Bungoro	2	38	11	0	2	0	0	53
7	Pusk Bowong Cindea	1	24	7	0	0	0	0	32
8	Pusk Labakkang	2	25	12	0	0	0	0	39
9	Pusk Taraweang	1	27	17	0	2	0	0	47
10	Pusk Pundata Baji	2	28	9	0	1	0	0	40
11	Pusk Ma'rang	2	28	9	1	0	0	0	40
12	Pusk Padang Lampe	10	20	10	0	0	0	0	40
13	Pusk Segeri	1	39	8	0	1	0	0	49
14	Pusk Baring	2	16	10	0	1	0	0	29
15	Pusk Mandalle	1	27	10	0	0	0	0	38
16	Pusk Balocci	2	26	11	0	0	0	0	39
17	Pusk Bantimala	1	14	13	0	1	0	0	29
18	Pusk Lk Tupabbiring	1	18	9	0	1	0	0	29
19	Pusk Sarappo	1	24	10	0	1	0	0	36
20	Pusk Sabutung	1	30	16	0	1	0	0	48
21	Pusk Lk Kalmas	1	24	15	0	0	0	0	40
22	Pusk Pamantauang	0	15	16	0	0	0	0	31
23	Pusk Lk Tangaya	1	11	22	0	0	0	0	34
24	Pusk Sailus	1	17	16	0	0	0	0	34
25	RS Batara Siang	60	154	81	2	13	2	1	313
26	RS Batiling	3	41	15	0	0	0	0	59
27	RS Pratama Sailus	0	8	9	0	0	0	0	17
28	UPTD Labkesda	0	11	2	0	1	0	0	14
TOTAL		126	857	377	3	27	2	1	1393

Sedangkan untuk Komposisi ASN PPPK PW Menurut Jenjang Pendidikan di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 1.4 Komposisi ASN PPPK PW Menurut Jenjang Pendidikan Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	JENJANG PENDIDIKAN PPPK PW							JUMLAH
		S2	S1 / D4	D3	D1	SMA	SMP	SD	
1	Dinas Kesehatan	1	18	1	0	8	0	0	28
2	Pusk Kota Pangkajene	1	12	35	0	7	1	0	56
3	Pusk Bonto Perak	0	12	35	0	2	1	0	50
4	Pusk Minasatene	0	14	19	0	5	0	0	38
5	Pusk Kalabbirang	0	11	50	0	3	0	0	64
6	Pusk Bungoro	0	18	51	0	5	0	0	74
7	Pusk Bowong Cindea	0	8	36	0	3	0	0	47
8	Pusk Labakkang	0	13	44	0	1	0	0	58
9	Pusk Taraweang	0	4	30	0	5	1	0	40
10	Pusk Pundata Baji	0	3	43	0	2	0	0	48
11	Pusk Ma'rang	0	18	45	1	2	0	0	66
12	Pusk Padang Lampe	0	6	19	0	0	0	0	25
13	Pusk Segeri	0	9	24	0	3	0	0	36
14	Pusk Baring	0	3	18	0	0	0	0	21
15	Pusk Mandalle	0	9	19	0	6	1	0	35
16	Pusk Balocci	0	9	26	0	1	0	0	36
17	Pusk Bantimala	0	9	27	0	9	0	0	45
18	Pusk Lk Tupabbiring	0	6	15	0	1	0	0	22
19	Pusk Sarappo	0	3	25	0	3	0	0	31
20	Pusk Sabutung	0	6	30	0	4	0	0	40
21	Pusk Lk Kalmas	0	7	27	0	2	0	0	36
22	Pusk Pamantauang	0	4	19	0	1	0	0	24
23	Pusk Lk Tangaya	0	2	13	0	0	0	0	15
24	Pusk Sailus	0	1	13	0	2	0	1	17
25	RS Batara Siang	0	96	194	0	76	1	0	367
26	RS Batiling	0	12	40	0	10	0	0	62
27	RS Pratama Sailus	0	0	0	0	0	0	0	0
28	UPTD Labkesda	0	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL		2	313	898	1	162	5	1	1382

c. Jenis kelamin.

Komposisi SDM Berdasarkan Jenis di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep Per tanggal 31 Desember 2025, terdiri dari 232 orang laki – laki dan 1.157 orang perempuan. Sedangkan untuk ASN PPPK PW terdiri dari 178 orang laki – laki dan 1.204 orang perempuan.

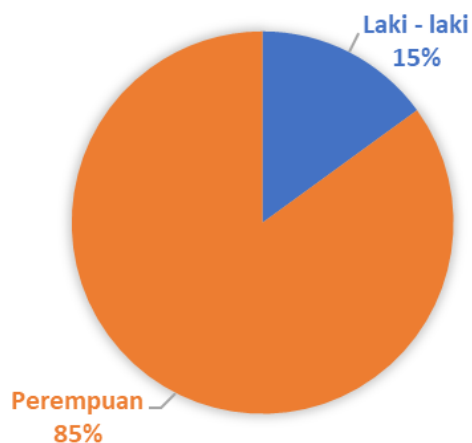
Tabel 1.5 Komposisi SDM ASN Berdasarkan Gender Dinas Kesehatan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Dinas Kesehatan	23	56	79
2	Pusk Kota Pangkajene	6	44	50
3	Pusk Bonto Perak	9	46	55
4	Pusk Minasatene	5	38	43
5	Pusk Kalabbirang	6	30	36
6	Pusk Bungoro	6	47	53
7	Pusk Bowong Cindea	4	28	32
8	Pusk Labakkang	8	31	39
9	Pusk Taraweang	3	40	43
10	Pusk Pundata Baji	4	36	40
11	Pusk Ma'rang	10	30	40
12	Pusk Padang Lampe	4	36	40
13	Pusk Segeri	7	42	49
14	Pusk Baring	4	25	29
15	Pusk Mandalle	5	33	38
16	Pusk Balocci	8	31	39
17	Pusk Bantimala	3	26	29
18	Pusk Lk Tupabbiring	9	20	29
19	Pusk Sarappo	6	30	36
20	Pusk Sabutung	4	44	48
21	Pusk Lk Kalmas	7	33	40
22	Pusk Pamantauang	10	21	31
23	Pusk Lk Tangaya	7	27	34
24	Pusk Sailus	11	23	34
25	RS Batara Siang	48	265	313
26	RS Batiling	10	49	59
27	RS Pratama Sailus	4	13	17
28	UPTD Labkesda	1	13	14
J U M L A H		232	1,157	1,389

Tabel 1.6 Komposisi SDM ASN PPPK PW Berdasarkan Gender Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN PPPK PW		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Dinas Kesehatan	7	21	28
2	Pusk Kota Pangkajene	6	50	56
3	Pusk Bonto Perak	5	45	50
4	Pusk Minasatene	2	36	38
5	Pusk Kalabbirang	4	60	64
6	Pusk Bungoro	6	68	74
7	Pusk Bowong Cindea	1	46	47
8	Pusk Labakkang	5	53	58
9	Pusk Taraweang	3	37	40
10	Pusk Pundata Baji	3	45	48
11	Pusk Ma'rang	4	62	66
12	Pusk Padang Lampe	1	24	25
13	Pusk Segeri	9	27	36
14	Pusk Baring	1	20	21
15	Pusk Mandalle	7	28	35
16	Pusk Balocci	3	33	36
17	Pusk Bantimala	5	40	45
18	Pusk Lk Tupabbiring	6	16	22
19	Pusk Sarappo	3	28	31
20	Pusk Sabutung	4	36	40
21	Pusk Lk Kalmas	6	30	36
22	Pusk Pamantauang	5	19	24
23	Pusk Lk Tangaya	0	15	15
24	Pusk Sailus	5	12	17
25	RS Batara Siang	70	297	367
26	RS Batiling	7	55	62
27	RS Pratama Sailus	0	0	0
28	UPTD Labkesda	0	1	1
J U M L A H		178	1204	1382

Gambar 1.5 Komposisi SDM berdasarkan Gender

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN GENDER

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah dan jenis peralatan / aset kantor yang digunakan mendukung aktivitas kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Tabel 1.7 Jenis dan Jumlah Peralatan Kantor Dinas Kesehatan Tahun 2025

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH (UNIT)	KETERANGAN
1	Mobil	2	rusak
2	Motor	6	rusak
3	Lemari	26	rusak sedang
4	Meja	30	10 rusak
5	Kursi	45	15 rusak
6	AC	24	5 rusak
7	Kipas angin	18	6 rusak
8	Kulkas	4	baik
9	Laptop dan notebook	16	5 rusak
10	Komputer PC	13	3 rusak
11	Printer	14	6 rusak
12	TV	4	baik
13	Scanner	2	baik
14	Generator	1	rusak berat

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH (UNIT)	KETERANGAN
15	Mesin Absen	2	baik
16	Apar	6	baik
17	CCTV	1 set	baik
18	Dispenser	3	baik
19	Proyektor	1	rusak

1.3.3 Isu Strategis Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan tingkat daerah, regional maupun permasalahan tingkat nasional. Adapun isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan antara lain:

1. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu yang masih tinggi masih merupakan masalah kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Masih adanya kasus kematian ibu menunjukkan bahwa masih diperlukan tambahan program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil seperti gerakan sayang ibu, pemberian makanan tambahan ibu hamil, pelayanan kesehatan setelah melahirkan, desa siaga, dan deteksi dini ibu hamil resiko tinggi.

2. Angka Kematian Bayi

Begitu pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) masih menjadi isu strategis dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Di Kabupaten Pangkep jumlah kematian bayi pada tahun 2023 tercatat 13 kasus kematian. Jumlah ini mengalami penurunan di tahun 2024, dimana tercatat ada 4 kasus kematian bayi. Hal ini menunjukkan bahwa program - program untuk mengurangi angka kematian bayi senantiasa harus tetap dikedepankan, misalnya program pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak-anak, program ASI Eksklusif, program gizi masyarakat serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil.

3. Keluhan Masalah Kesehatan

Kenyataan yang terjadi sampai saat ini derajat kesehatan masyarakat masih rendah khususnya pada masyarakat miskin. Hal ini dapat digambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat miskin berdasarkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pangkep masih cukup tinggi.

Salah satu penyebabnya adalah karena mahalnya biaya kesehatan sehingga akses ke pelayanan kesehatan pada umumnya masih rendah. Asuransi kesehatan adalah salah satu upaya untuk mengatasi masalah ketidakmampuan terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan.

4. Pandemi Corona Virus (Covid-19)

Pandemi Covid-19 merupakan kondisi pandemi global yang juga melanda Kabupaten Pangkep. Kejadian ini menyebabkan banyak korban mengalami kematian akibat infeksi virus corona serta terkonfirmasi positif terinfeksi virus tersebut.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026 mengikuti visi dan misi Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026 yaitu **“Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan”**.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui misi pembangunan yaitu :

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal.
2. **Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.**
3. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah.
4. **Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif.**
5. Meningkatkan tata kelola sumberdaya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dinas Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya misi kedua tersebut.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 - 2026 adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategik Dinas Kesehatan
Kab. Pangkajene dan Kepulauan 2021 – 2026

Adapun indikator kinerja dari tiap sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tujuan	Meningkatkan Kepuasan dan Derajat Kesehatan Masyarakat
Sasaran	1 Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat
	2 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Kesehatan

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra
Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
							2022	2023	2024	2025	2026
1	2		3		5	6	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kepuasan dan derajat kesehatan masyarakat	UHH (Usia Harapan Hidup)	1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat	AUHH (Angka Usia Harapan Hidup)	Nilai	66,66	67,00	67,17	67,34	67,52	67,69
				Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	106	105	104	103	102	101
				Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran hidup	3,17	3,11	3,10	3,05	3,02	3
				Prevalensi Balita Stunting	%	17,7	13,09	11,1	9,1	7	5
2		Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang kesehatan (IKM)	2. Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	79,07	79,10	78	78,5	78,8	100

2.1.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dengan terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan pemetaan program kegiatan tahun 2024 disesuaikan dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan : Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Operasional Pelayanan Puskesmas Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan
			Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
			Kegiatan: Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kegiatan: Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Kegiatan: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Kegiatan: Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
3	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan: Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengembangan Puskesmas Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
			Kegiatan : Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2025 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Rencana Kerja (Renja) 2025, IKU dan APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kepuasan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Nilai	67.52
2	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	102
		Angka Kematian Bayi	per 1.000 kelahiran hidup	3.02
		Prevalensi Balita Stunting	%	7
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78.8
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai	B (> 60-70)

2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep Tahun 2021 – 2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5 IKU Dinas Kesehatan Kab.Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 – 2026

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN TAHUN 2025	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	KET
1	Meningkatkan Kepuasan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	UHH (Usia Harapan Hidup)	67,52	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Badan Pusat Statistik	
2	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup)	102	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di satu wilayah tertentu selama 1 tahun / jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan	
		Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran hidup)	3,02	Jumlah bayi yang dilahirkan di satu wilayah tertentu selama 1 tahun / jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1000	Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan	
		Prevalensi Stunting	7	Jumlah balita stunting / jumlah balita x 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan	
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang kesehatan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	78,8	Persentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan kesehatan	RS dan UPTD Puskesmas	

2.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator dengan penyelenggaraan urusan kesehatan sesuai dengan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Tabel 2.6 IKK Dinas Kesehatan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	$(\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}) / (\text{Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota})$	RS dan UPTD Puskesmas
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	$(\text{Jumlah Rumah Sakit Rujukan yang terakreditasi}) / (\text{Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
3	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$(\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}) / (\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
4	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	$(\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan}) / (\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$(\text{Jumlah bayi baru lahir mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}) / (\text{Jumlah bayi baru lahir di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$(\text{Jumlah balita mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}) / (\text{Jumlah balita di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$(\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar @yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}) / (\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
8	Persentase orang usia 15 - 29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$(\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun @yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}) / (\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$(\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas@yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}) / (\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$(\text{Jumlah penderita hipertensi@yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}) / (\text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$(\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}) / (\text{Jumlah penderita DM di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
12	Persentase OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$(\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar}) / (\text{Jumlah penderita TBC di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$(\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}) / (\text{Jumlah penderita TBC di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$(\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}) / (\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas

2.7 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu :

Tabel 2.7 SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

NO	INDIKATOR SPM	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$(\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}) / (\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	$(\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan}) / (\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$(\text{Jumlah bayi baru lahir mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}) / (\text{Jumlah bayi baru lahir di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas

NO	INDIKATOR SPM	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$(\text{Jumlah balita mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}) / (\text{Jumlah balita di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$(\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar @yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}) / (\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
6	Persentase orang usia 15 - 29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$(\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun @yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}) / (\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$(\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas @yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}) / (\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$(\text{Jumlah penderita hipertensi @yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}) / (\text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$(\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}) / (\text{Jumlah penderita DM di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
10	Persentase OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$(\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar}) / (\text{Jumlah penderita TBC di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$(\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}) / (\text{Jumlah penderita TBC di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$(\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}) / (\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten}) \times 100\%$	RS dan UPTD Puskesmas

2.9 Rencana Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 352.623.724.625,- Secara rinci rencana anggaran Belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Rencana Belanja Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene Dan Kepulauan Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	140,226,625,515	39.77%
2.	Belanja Barang dan Jasa	168,619,101,319	47.82%
3.	Belanja Modal	43,777,997,791	12.41%
Jumlah		352,623,724,625	100%

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program - program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Alokasi Anggaran per Sasaran Dinas Kesehatan
Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	232,440,095,111	65.92%
2.	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	97,256,738,681	27.58%
3.	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang kesehatan	22,926,890,833	6.50%
Jumlah		352,623,724,625	100%

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan adalah sebesar 65,92%. Anggaran ini digunakan untuk digunakan untuk biaya penunjang operasional atau kegiatan rutin lingkup Dinas Kesehatan termasuk didalamnya pembayaran gaji di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit.

Untuk sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang kesehatan digunakan anggaran sebesar Rp. 22.926.890.833,- atau 6,50% dari total anggaran dinas kesehatan. Sedangkan anggaran sebesar Rp.97.256.738.681,- atau 27,58% digunakan untuk sasaran strategis meningkatnya status kesehatan masyarakat.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja dari setiap sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja dengan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Presentase Tingkat Capaian	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	X 100 %
-------------------------------	---	--	---------

2. Rumus 2 : Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Presentase Tingkat Capaian	=	$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}}$	X 100 %
-------------------------------	---	--	---------

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI CAPAIAN KINERJA	INTERPRETASI	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Penilaian tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya adalah dengan cara membandingkan Persentase Capaian Kinerja dibandingkan dengan Persentase Capaian Keuangan. Apabila diperoleh angka 1 berarti EFISIEN. Apabila diperoleh angka LEBIH BESAR dari 1 maka dikategorikan SANGAT EFISIEN. Apabila diperoleh angka DIBAWAH 1, maka dikategorikan TIDAK EFISIEN.

Tabel 3.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Tingkat Efisiensi	Kategori
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		127.00	88.97	1.43	Sangat Efisien
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup)	108			
		Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran hidup)	175.4			
		Prevalensi Stunting	97.6			
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang kesehatan		113.99	84.93	1.34	Sangat Efisien
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	113.99			
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan		104.71	99.13	1.06	Sangat Efisien
		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	104.71			
Tingkat Efisien					1.28	Sangat Efisien

3.2 Capaian Kinerja

3.2.1 Capaian Kinerja berdasarkan IKU Dinas Kesehatan Tahun 2025

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.3 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan untuk tahun 2025. Pencapaian Indikator tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	satuan	2025		Capaian
				Target	Realisasi	
Meningkatkan Kepuasan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya Kepuasan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	1 Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67.52	73.48	108.83
	2. Meningkatnya status kesehatan masyarakat	2 Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran hidup	102	134.00	68.63
		3 Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran hidup)	per 1.000 Kelahiran hidup	3.02	1.34	225.4
		4 Prevalensi Stunting	%	7	9,24	68
	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang kesehatan	5 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	78.8	87.77	111.38
	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	6 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai	70	74.55	106.50
Rata - Rata Capaian Kinerja						114.79

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Kesehatan pada Tahun 2025 adalah sebesar 114,79 % dengan kategori Sangat Tinggi.

Dari 5 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2025, terdapat 4 (empat) indikator menunjukkan capaian di atas 95% dan 2 (dua) indikator sedang < 75%. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

3.2.2 Capaian Kinerja berdasarkan IKK Dinas Kesehatan Tahun 2025

Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja berdasarkan IKK
Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	satuan	2025		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk (Per 1.000 penduduk)	Angka	1.00	0.66	66.00
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	%	100.00	66.67	66.67
3	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100.00	97.00	97.00
4	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100.00	99.00	99.00
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100.00	100	100.00
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100.00	99.00	99.00
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100.00	100	100.00
8	Persentase orang usia 15 - 29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100.00	100	100.00
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100.00	99	99.00
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100.00	99	99.00
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100.00	100	100.00
12	Persentase OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100.00	100	100.00
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayananTBC sesuai standar	%	100.00	100	100.00
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100.00	100	100.00

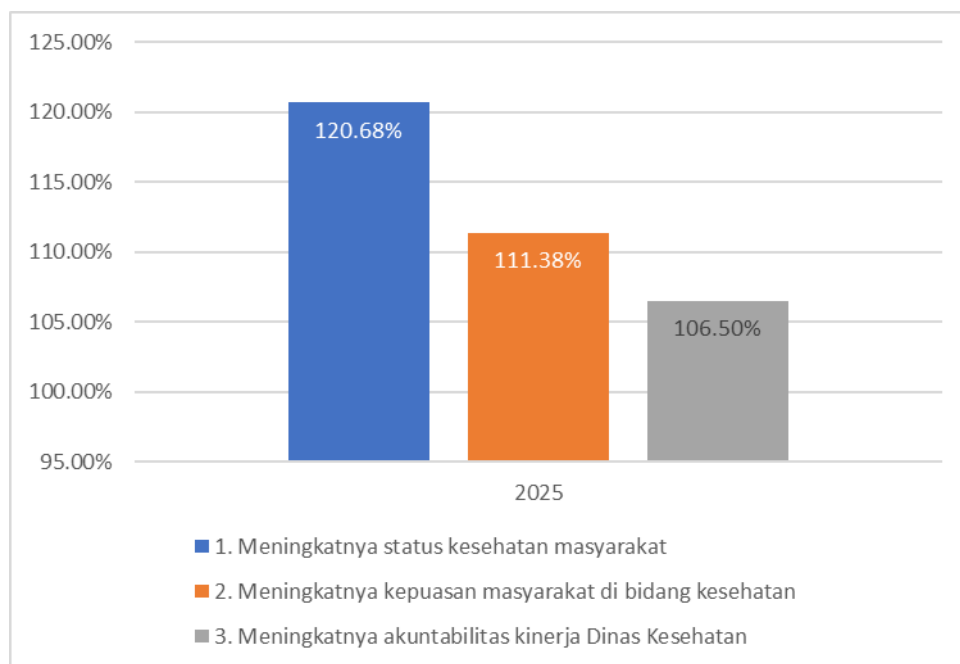
Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja berdasarkan IKK dengan kriteria sedang 2 (dua) indikator yaitu Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk dan Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi. Sedangkan 12 (dua belas) indikator yang juga merupakan Standar Pelayanan Miniman (SPM) Bidang Kesehatan mencapai kategori Sangat Tinggi.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 terdapat 5 indikator menunjukkan capaian sangat tinggi. Tingkat capaian IKU tahun 2025 dalam gambar dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 3.5 Persentase Pencapaian IKU Dinas Kesehatan Kab.Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

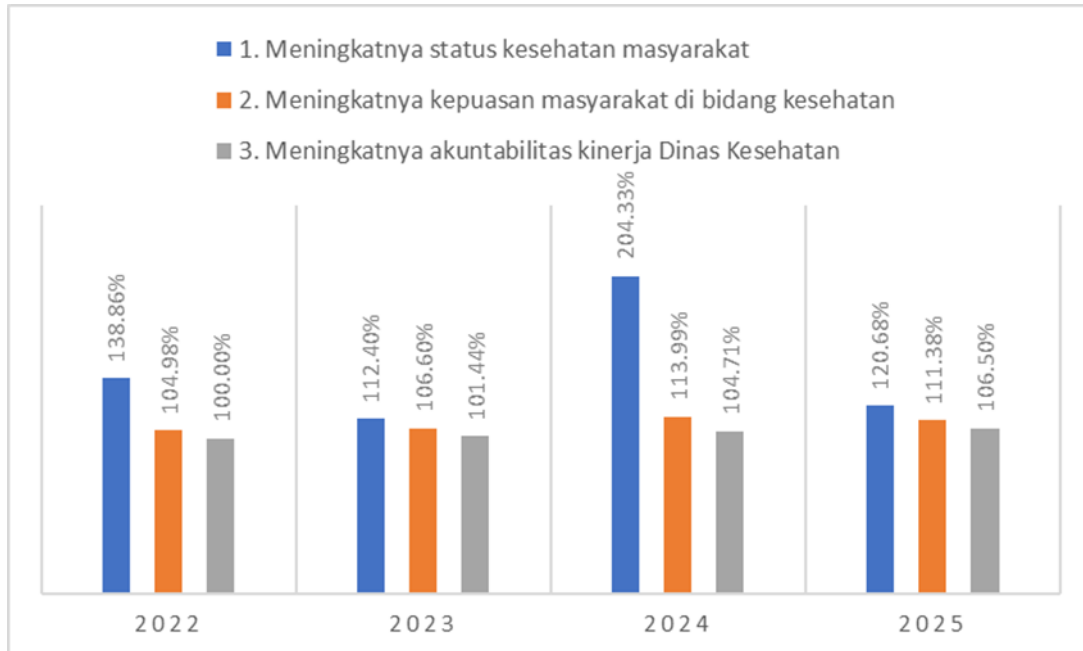


Gambar 3.6 Capaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025



B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2025

Gambar 3.7 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2025



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu tahun 2022 – 2025 capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya status Kesehatan masyarakat mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2024 yaitu mencapai 204,33% dari tahun sebelumnya namun menurun di tahun 2025 yaitu 120,68%. Penurunan capaian sasaran strategis ini dipengaruhi oleh capaian dari Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup) yang menurun dari capaian yang ditargetkan. Adapun Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran hidup) yang juga melebihi capaian dari target yang telah ditetapkan di Renstra Dinas Kesehatan.

Pada sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang Kesehatan juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 – 2025 yaitu 104,98% pada tahun 2022, 106,60% pada tahun 2023, 113,99% pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 120,68% di tahun 2025. Peningkatan ini dipengaruhi oleh indikator IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap pelayanan Kesehatan di 23 Puskesmas dan 3 Rumah Sakit.

Pada sasaran strategis yang ketiga yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 – 2024 yaitu 100% pada tahun 2022, 101,44% pada tahun 2023, 104,71% pada tahun 2024 dan mencapai 106,5% di tahun 2025. Peningkatan ini dipengaruhi oleh Nilai SAKIP Dinas Kesehatan yang semakin meningkat.

3.2.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target akhir dalam Renstra

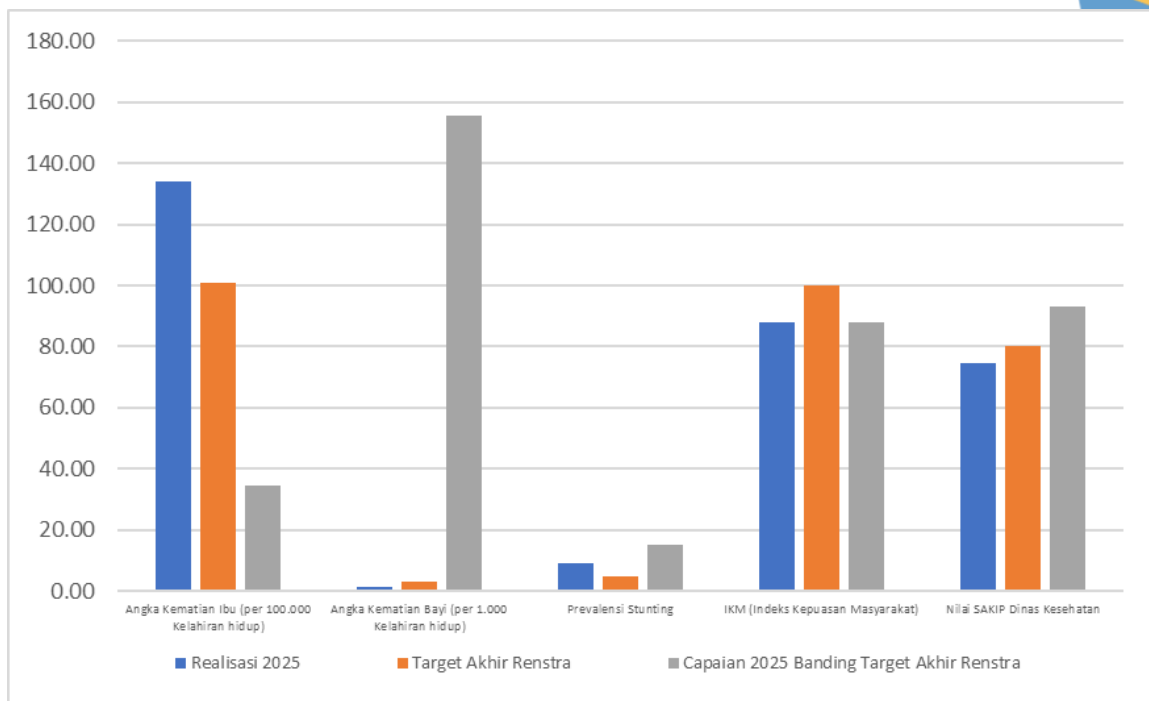
No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian 2025 Banding Target Akhir Renstra
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	73.48	67.69	91.4
2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup)	134.00	101	34.3
3	Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran hidup)	1.34	3	155.3
4	Prevalensi Stunting	9.24	5	15.2
5	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	87.77	100	87.77
6	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	74.55	80	93.2

Jika dilihat pada tabel diatas, maka dari 5 indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sudah ada 1 (satu) indikator yang telah mencapai target Renstra 2026 yaitu Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran hidup). Untuk 4 (tiga) indikator yang lain masih diperlukan kerja keras, fokus dan kesungguhan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk mencapai target Renstra 2026.

Untuk tahun 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengacu ke Renstra Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan. Sehingga tahun 2025 ini adalah tahun berakhirnya Renstra Dinas Kesehatan untuk periode renstra yang lalu. Sehingga yang dapat disimpulkan adalah yang harus tetap menjadi focus adalah menurunkan Angka Kematian Ibu, menjaga agar Kematian Bayi tetap konstan atau tidak meningkat, menurunkan prevalensi stunting, menjaga agar Indeks Kepuasan Masyarakat tetap sama bahkan meningkat dan meningkatkan nilai SAKIP Dinas Kesehatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target akhir dalam Renstra Tahun 2026 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target dalam Renstra



3.2.4. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatkan Kepuasan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Pada tabel di bawah ini dijelaskan mengenai target dan realisasi pada sasaran pertama yaitu Meningkatkan Kepuasan dan Derajat Kesehatan Masyarakat.

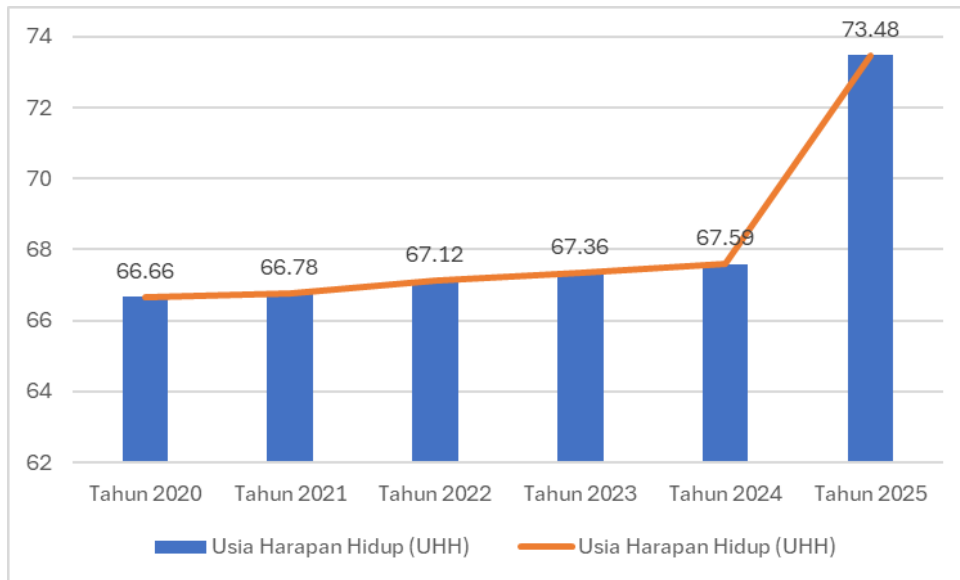
Tabel 3.10 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 (Meningkatnya Kepuasan dan Derajat Kesehatan Masyarakat) Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIN S.D 2025 TERHADAP 2026 (%)
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67.52	73.48	108.83	67.69	108.55

Untuk tahun 2024, capaian kinerja indikator pada sasaran 1 “Meningkatnya Kepuasan dan Derajat Kesehatan Masyarakat” menunjukkan kinerja yang *Sangat Tinggi*, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 108,55% dari target pada akhir RENSTRA. Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) juga merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Adapun capaian Indikator “Usia Harapan Hidup” tahun 2020 – 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.11 Perbandingan Usia Harapan Hidup Tahun 2020 – 2025 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sasaran 2. Meningkatnya status kesehatan masyarakat

Pada tabel di bawah ini dijelaskan mengenai target dan realisasi pada sasaran pertama yaitu Meningkatnya status kesehatan masyarakat.

Tabel 3.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2 (Meningkatnya status kesehatan masyarakat) Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIN S.D 2025 TERHADAP 2026 (%)
1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran hidup	102	134	68.63	101	67.3
2	Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran hidup)	per 1.000 Kelahiran hidup	3.02	1.34	225.40	3	155.33
3	Prevalensi Stunting	%	7	9.24	68.00	5	10.86
					120.68		77.84

Untuk tahun 2025, capaian kinerja indikator pada sasaran 1 “Meningkatnya status kesehatan masyarakat” menunjukkan kinerja yang *Sangat Tinggi*, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 77,84% dari target pada akhir RENSTRA. Satu indikator telah malampaui target yaitu Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran hidup) sedangkan indikator

Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup) dan Prevalensi Stunting masih belum mencapai target.

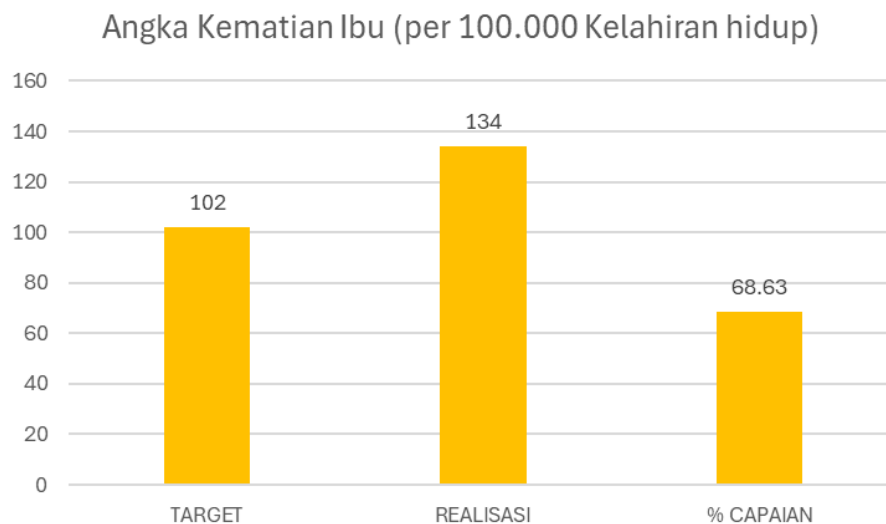
1. Angka Kematian Ibu

Pada tabel di bawah ini dijelaskan mengenai target dan realisasi pada indikator pertama yaitu Angka Kematian Ibu

Tabel 3.13 Capaian indikator Angka Kematian Ibu

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran hidup	102	134	68.63

Gambar 3.14 Capaian indikator Angka Kematian Ibu



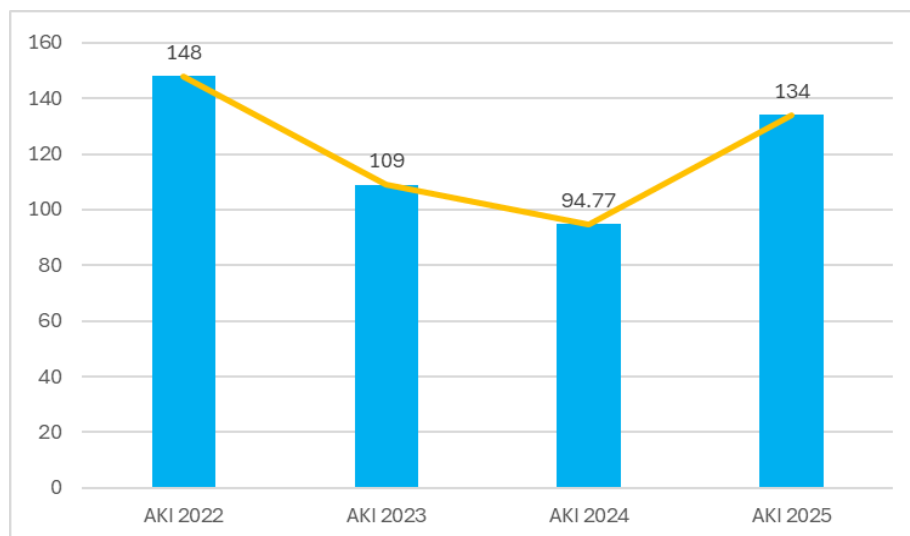
Untuk capaian indikator pertama “Angka Kematian Ibu” dari target di tahun 2025 yaitu 102 per 100.000 KLH realisasinya yaitu 134/100.000 KLH dengan presentasi capaian yaitu 68.63%. Hal ini menunjukkan kenaikan kasus kematian ibu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025, sehingga capaian juga menurun dari 108% tahun 2024 menjadi 68,63% ditahun 2025. Hal ini juga dipengaruhi oleh peningkatan target di tahun 2025 sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021 – 2026.

Pada tahun 2022 jumlah kematian ibu sebanyak 8 kasus dengan 5.399 kelahiran hidup sehingga Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 148/100.000 KLH. Pada tahun 2023 Angka Kematian Ibu mengalami penurunan dengan jumlah kematian ibu yaitu 6 kasus dengan 5.481 kelahiran hidup sehingga didapatkan AKI 2023 yaitu 109/100.000 KLH. Pada tahun

2024 Angka Kematian Ibu mengalami penurunan dengan jumlah kematian ibu yaitu 5 kasus dengan 5.276 kelahiran hidup sehingga didapatkan AKI 2024 yaitu 94,77/100.000 KLH. Pada tahun 2024, Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) telah melebihi target yang telah direncanakan yaitu 103/100.000 KLH. Namun pada tahun 2025 kembali mengalami kenaikan sebanyak 7 kasus dengan 5.189 kelahiran hidup sehingga Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 134/100.000 KLH.

Adapun perbandingan Angka Kematian Ibu (per 100.000 KLH) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.15 Perbandingan Angka Kematian Ibu (per 100.000 KLH) Tahun 2022 - 2025



Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa Angka Kematian Ibu Per 100.000 KLH semakin menurun dari tahun 2022 sampai tahun 2024 kemudian meningkat Kembali di tahun 2025. Angka kematian ibu (maternal mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia.

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Masih adanya kasus kematian ibu menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil seperti gerakan sayang ibu, pemberian makanan tambahan ibu hamil, pelayanan kesehatan setelah melahirkan, desa siaga, dan deteksi dini ibu hamil resiko tinggi.

Pada indikator ini kasus kematian ibu mengalami penurunan dari 8 kasus di 2022 menurun menjadi 6 kasus pada 2023 dan tahun 2024 turun menjadi 5 kasus namun di tahun 2025 kembali mengalami kenaikan menjadi 7 kasus. Peningkatan kasus ini perlu menjadi perhatian dari tenaga kesehatan Kabupaten di Pangkajene dan Kepulauan.

Untuk menekan Angka Kematian Ibu telah dilaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Pendampingan Tim Ahli (Dokter Spesialis Kandungan dan Dokter Spesialis Anak) ke puskesmas daratan (puskesmas kepulauan mengikut ke puskesmas daratan) dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, kegawatdaruratan, dan sistem rujukan maternal dan neonatal;
2. On The Job Training (OJT) dimana tenaga Kesehatan puskesmas (Dokter, Bidan, Perawat) mendapatkan pelatihan dan pembelajaran selama 3 hari di rumah sakit terkait pelayanan kesehatan dan pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, guna meningkatkan kompetensi tenaga Kesehatan di Puskesmas.
3. Pengkajian kasus kematian ibu dan anak bersama tim AMPSR (Audit Maternal dan Perinatal-Surveilans Respons) Kabupaten Pangkep untuk menghasilkan suatu rekomendasi agar kasus kematian yang sama tersebut tidak berulang nantinya. Hasil rekomendasi tersebut dipublikasikan dalam bentuk diseminasi yang menghadirkan lintas sektor dan lintas program yang masing-masing berperan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak.

Namun, masih terdapat 7 kasus kematian ibu, penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan, pre eklampsia/eklampsia, Kehamilan ektopik terganggu (KET), dan Diabetes Melitus (DM) dalam kehamilan. Masih ada nya kasus ini terjadi menunjukkan masih lemahnya proses skrining kesehatan pada ibu hamil sehingga komplikasi terdeteksi setelah menjadi berat dan mengancam nyawa ibu. Selain itu, Belum semua faskes, baik FKTP maupun FKRTL mempunyai sarana prasarana untuk penanganan kasus kegawatdaruratan maternal, belum semua tenaga kesehatan terlatih untuk penanganan kasus kegawatdaruratan maternal, tingkat pengetahuan masyarakat dan hambatan budaya sehingga keluarga dan ibu hamil terlambat mengambil keputusan dan juga penolakan untuk Tindakan medis yang harus dilakukan yang menyebabkan terlambat mendapatkan penanganan, Adanya kasus rujukan tidak terencana, Masih ada 4 Terlalu diantaranya terlalu Muda melahirkan, terlalu sering melahirkan dan terlalu banyak anak, menolak pengobatan sehingga tidak mau dirujuk dan masih ada persalinan non fasilitas kesehatan.

Dalam pencapaian target “**Angka Kematian Ibu**” terdapat **Penyebab yang menghambat** yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tempat kematian terbanyak adalah pada faskes rujukan/rumah sakit dengan penyebab perdarahan dan preeklampsia/eklampsia;
2. Dari segi pelayanan bahwa tindakan pencegahan, deteksi dini komplikasi dan tata laksana tidak adekuat oleh karena sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterampilan petugas yang belum optimal dalam penanganan kegawatdaruratan maternal;
3. Pilihan tempat mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil pada fasilitas Kesehatan Swasta ataupun di luar Kab. Pangkep terkadang membuat ibu hamil tidak teridentifikasi oleh puskesmas mengenai kondisi perkembangan kesehatannya dan terkadang ibu hamil enggan untuk dipantau oleh petugas Kesehatan dari puskesmas karena selama hamil sudah kontak dengan fasilitas Kesehatan swasta yang menurutnya lebih baik dari Puskesmas.
4. Kondisi pengetahuan dan budaya masyarakat, dimana masih ada penolakan pengobatan/perawatan serta tidak mengikuti anjuran pengobatan/perawatan yang diberikan. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan dalam pemberian pertolongan sehingga mengakibatkan kematian Ibu; serta
5. Kondisi geografis di kepulauan ditambah kondisi cuaca membuat rujukan menjadi sulit dilakukan

Adapun **Alternatif Pemecahan Masalah** Pencapaian Target Sasaran ” **Angka Kematian Ibu**” adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Meningkatkan kerjasama lintas OPD dalam proses rujukan, diantaranya Dinas Sosial atau pihak Desa / Kelurahan serta Camat dalam kepentingannya memperhatikan keluarga ibu hamil yang ditinggalkann ketika ibu hamil harus tinggal di Rumah Tunggu Kelahiran terutama kepada anak – anaknya yang tidak mempunyai sanak saudara yang lain dan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
2. Kerjasama lintas sektor juga semakin ditingkatkan dalam hal edukasi kepada masyarakat tentang tanda – tanda bahaya kehamilan atau sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sehingga masyarakat sadar dan segera ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan jika ada tanda – tanda bahaya tersebut, sehingga mau merujuk keluarga nya.
3. Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan harus lebih memaksimalkan pelayanan ibu melahirkan, bayi sakit, sehingga kematian bayi dapat ditekan. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan yang menangani persalinan.

4. Upaya penurunan Kasus Kematian Ibu dapat dilakukan dengan pendampingan/pemantauan ibu hamil di setiap wilayah Puskesmas oleh masing - masing bidan,. Selain itu perlu diaktifkan lagi kelas ibu hamil dan kunjungan dari rumah ke rumah (door to door).
5. Upaya menekan kematian ibu dan bayi untuk ibu hamil dari daerah terpencil dan sulit baik wilayah kepulauan maupun wilayah pegunungan dapat menggunakan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di beberapa puskesmas daratan termasuk RTK kabupaten, pegunungan dan kepulauan yang telah disediakan di dekat Rumah Sakit Rujukan.
6. Perlunya pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal, yang paling utama pelatihan manual placenta khususnya di daerah kepulauan yang sulit akses untuk rujukan segera.

Adapun persebaran kematian ibu sesuai dengan wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Jumlah Kematian Ibu Per Puskesmas Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

NO	PUSKESMAS	LAHIR HIDUP	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	Kota Pangkajene	432	2
2	Bonto Perak	252	0
3	Minasate'ne	472	1
4	Kalabbirang	139	0
5	Bungoro	437	1
6	Bowong Cindea	214	0
7	Labakkang	214	0
8	Taraweang	300	0
9	Pundata Baji	221	0
10	Ma'rang	355	0
11	Padang Lampe	118	0
12	Segeri	195	0
13	Baring	109	0
14	Mandalle	184	0
15	Balocci	210	0
16	Bantimala	149	0
17	Lk. Tupabbiring	116	0
18	Sarappo	181	0

NO	PUSKESMAS	LAHIR HIDUP	JUMLAH KEMATIAN IBU
19	Sabutung	208	1
20	Lk. Tangaya	222	2
21	Sailus	149	0
22	Lk. Kalmas	199	0
23	Pammantauang	113	0
KABUPATEN		5,189	7
ANGKA KEMATIAN IBU		134/100000 Kelahiran Hidup	

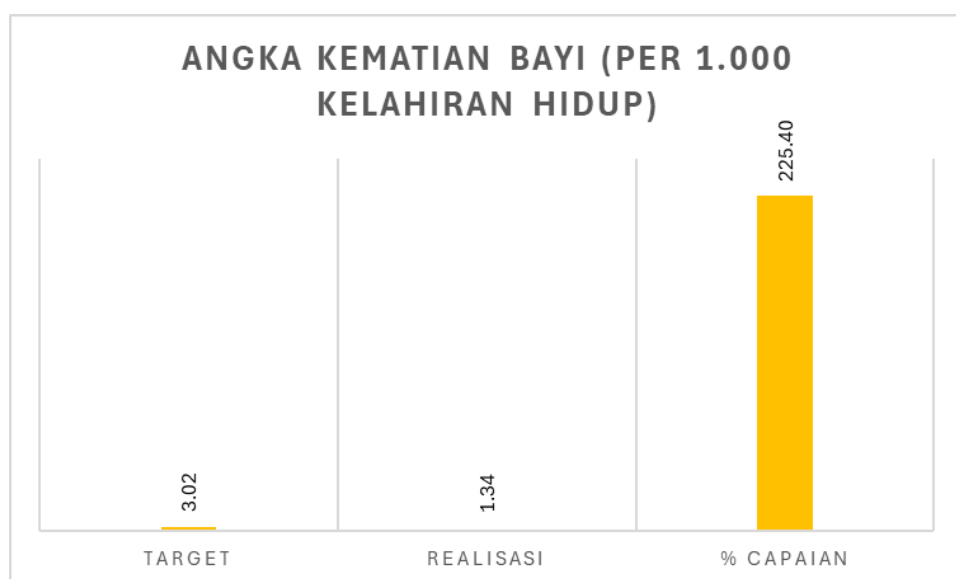
2. Angka Kematian Bayi

Pada tabel di bawah ini dijelaskan mengenai target dan realisasi pada indikator kedua yaitu Angka Kematian Bayi.

Tabel 3.17 Capaian indikator Angka Kematian Bayi

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran hidup)	per 1.000 Kelahiran hidup	3.02	1.34	225.40

Gambar 3.18 Capaian indikator Angka Kematian Bayi

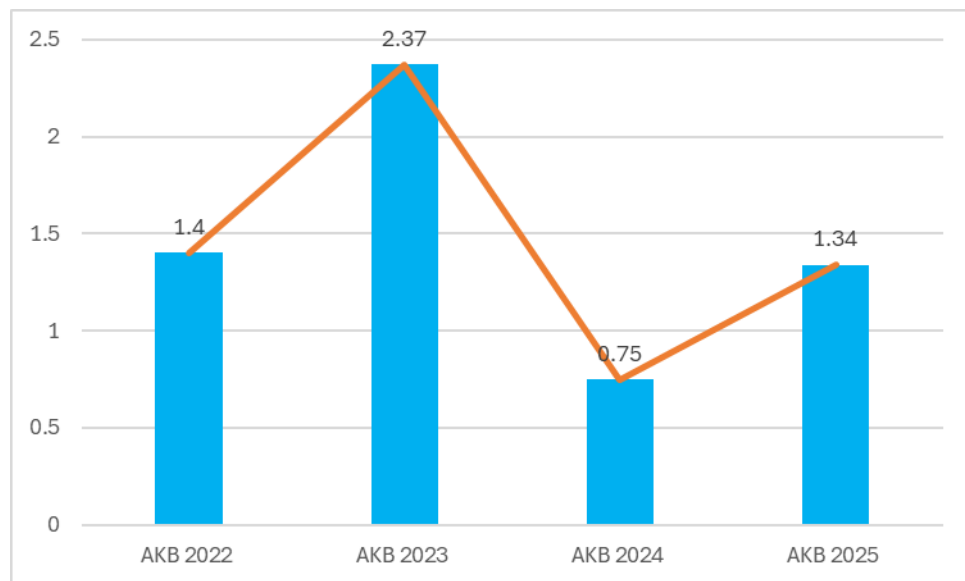


Untuk capaian indikator kedua “Angka Kematian Bayi” dari target 3,02 per 1.000 KLH realisasinya yaitu 7 kasus per 5.276 Kelahiran Hidup atau 1,34/100.000 KLH dengan presentasi capaian yaitu 225,4%. Dibandingkan dengan tahun 2024 maka di tahun 2025 mengalami kenaikan kasus Dimana pada tahun 2024 target 3,05 per 1.000 KLH realisasinya yaitu 4 kasus per 5.276 Kelahiran Hidup atau 0,75/100.000 KLH.

Kasus kematian bayi post neonatus (>28 hari – 11 bulan) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bersifat fluktuatif. Pada tahun 2024 terdapat 4 kasus per 5.276 Kelahiran Hidup atau 0,75/100.000 KLH, tahun 2023 jumlah kasus kematian bayi sebanyak 13 kasus kematian diantara 5.481 kelahiran hidup atau 2,37/1.000 KLH. Tahun 2022 jumlah kematian bayi sebanyak 8 kasus kematian diantara 5.399 kelahiran hidup atau 1,40/1.000 KLH.

Adapun perbandingan Angka Kematian Bayi tahun 2022 – 2025 (per 1000 KLH) dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.19 Perbandingan Angka Kematian Bayi (per 1000 KLH) Tahun 2022 - 2025



Perhitungan Angka Kematian Bayi di Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dihitung berdasarkan rumus indikator IKU di Rensta Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 – 2026. Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian yang terjadi pada bayi usia > 28 hari – 11 bulan (tanpa kematian neonatal). Adapun persebaran kasus kematian bayi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20 Jumlah Kematian Bayi Per Puskesmas Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

NO	PUSKESMAS	LAHIR HIDUP	JUMLAH KEMATIAN POST NEONATUS (>28 HARI - 11 BULAN)
1	Kota Pangkajene	432	0
2	Bonto Perak	252	0
3	Minasate'ne	472	0
4	Kalabbirang	139	0
5	Bungoro	437	0
6	Bowong Cindea	214	1
7	Labakkang	214	1
8	Taraweang	300	0
9	Pundata Baji	221	0
10	Ma'rang	355	1
11	Padang Lampe	118	1
12	Segeri	195	0
13	Baring	109	0
14	Mandalle	184	0
15	Balocci	210	2
16	Bantimala	149	0
17	Lk. Tupabbiring	116	0
18	Sarappo	181	0
19	Sabutung	208	0
20	Lk. Tangaya	222	0
21	Sailus	149	0
22	Lk. Kalmas	199	1
23	Pammantauang	113	0
KABUPATEN		5,189	7
ANGKA KEMATIAN BAYI		1,34/1000 Kelahiran Hidup	

Selain dihitung berdasarkan IKU Dinas Kesehatan Tahun 2025, AKB juga dihitung berdasarkan definisi operasional pada Dokumen Indikator Program Kesehatan Masyarakat dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan yaitu Kematian bayi adalah bayi usia 0 -11 bulan (termasuk neonatal) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tetap menghitung indikator AKB sesuai dengan definisi operasional ini. Jika dihitung kematian bayi usia 0 – 11 bulan (termasuk neonatal) maka jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2025 sama dengan jumlah kasus pada tahun 2024 yaitu 42 kasus.

Pada Tahun 2022 jumlah kematian bayi 50 kasus kematian 5.399 kelahiran hidup sehingga didapatkan AKB 9,3/1.000 KLH. Pada tahun 2023 juga terdapat 61 kasus kematian bayi dengan 5.481 kelahiran hidup sehingga didapatkan AKB 11,13/1.000 KLH. Sedangkan pada tahun 2024 dan 2025 mengalami penurunan menjadi 42 kasus kematian bayi diantara 5.276 kelahiran hidup sehingga didapatkan AKB 7,9/1.000 KLH. Hal ini menunjukkan bahwa program - program untuk mengurangi angka kematian bayi sudah dijalankan dengan baik, mulai dari program pelayanan kesehatan ibu hamil, program imunisasi, pencegahan penyakit menular pada anak - anak, program ASI Eksklusif, program gizi masyarakat serta pemberian makanan sehat untuk ibu hamil. Namun jika masih terdapat kasus kematian maka masih perlu dilakukan analisis untuk menekan kasus kematian bayi tersebut. Dalam pencapaian target **“Angka Kematian Bayi”** terdapat **Faktor Penghambat** yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tempat kematian terbanyak adalah pada faskes rujukan/rumah sakit, dengan penyebab kematian seperti gangguan pernapasan, BBLR, kelahiran prematur, kejang demam/febris, diare dan infeksi;
2. Dari segi pelayanan bahwa tindakan pencegahan, deteksi dini komplikasi dan tata laksana tidak adekuat terutama kasus kegawat darurat neonatal oleh karena sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterampilan petugas yang belum optimal;
3. Kondisi pengetahuan dan budaya masyarakat, dimana masih ada penolakan pengobatan/perawatan serta tidak mengikuti anjuran pengobatan/perawatan yang diberikan. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan dalam pemberian pertolongan sehingga mengakibatkan kematian bayi; serta
4. Kondisi geografis di kepulauan ditambah kondisi cuaca membuat rujukan menjadi sulit di lakukan.

Adapun **Alternatif Pemecahan Masalah** Pencapaian Target Sasaran ” **Angka Kematian Bayi**” adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Meningkatkan kerjasama lintas OPD dalam proses rujukan, diantaranya Dinas Sosial atau pihak Desa / Kelurahan serta Camat dalam kepentingannya memperhatikan keluarga ibu hamil yang ditinggalkan ketika ibu hamil harus tinggal di Rumah Tunggu Kelahiran terutama kepada anak – anaknya yang tidak mempunyai sanak saudara yang lain dan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
2. Kerjasama lintas sektor juga semakin ditingkatkan dalam hal edukasi kepada masyarakat tentang tanda – tanda bahaya kehamilan atau sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sehingga masyarakat sadar dan segera ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan jika ada tanda – tanda bahaya tersebut, sehingga mau merujuk keluarga nya.

3. Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan harus lebih memaksimalkan pelayanan ibu melahirkan, bayi sakit, sehingga kematian bayi dapat ditekan. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah dan mutu tenaga kesehatan yang menangani persalinan.
4. Upaya penurunan Kasus Kematian Ibu dapat dilakukan dengan pendampingan/pemantauan ibu hamil di setiap wilayah Puskesmas oleh masing - masing bidan, kalau perlu dengan memakai aplikasi Bidan eKohor, yang dihubungkan dengan Tele - CTG sehingga bisa mendeteksi dengan cepat factor - faktor resiko dan bisa melakukan penanganan dengan segera termasuk rujukan. Selain itu perlu diaktifkan lagi kelas ibu hamil dan kunjungan dari rumah ke rumah (door to door).
5. Upaya menekan kematian ibu dan bayi untuk ibu hamil dari daerah terpencil dan sulit baik wilayah kepulauan maupun wilayah pegunungan dapat menggunakan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di beberapa puskesmas daratan termasuk RTK kabupaten, pegunungan dan kepulauan yang telah disediakan di dekat Rumah Sakit Rujukan.

Adapun persebaran kematian bayi (0 – 11 bulan) sesuai dengan wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.21 Jumlah Kematian Bayi Per Puskesmas Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

NO	PUSKESMAS	LAHIR HIDUP	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL + POST NEONATAL (0 - 11 BULAN)
1	Kota Pangkajene	432	1
2	Bonto Perak	252	2
3	Minasate'ne	472	4
4	Kalabbirang	139	0
5	Bungoro	437	0
6	Bowong Cindea	214	4
7	Labakkang	214	2
8	Taraweang	300	1
9	Pundata Baji	221	3
10	Ma'rang	355	4
11	Padang Lampe	118	3
12	Segeri	195	1
13	Baring	109	0
14	Mandalle	184	1
15	Balocci	210	5
16	Bantimala	149	0

NO	PUSKESMAS	LAHIR HIDUP	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL + POST NEONATAL (0 - 11 BULAN)
17	Lk. Tupabbiring	116	1
18	Sarappo	181	0
19	Sabutung	208	1
20	Lk. Tangaya	222	2
21	Sailus	149	3
22	Lk. Kalmas	199	3
23	Pammantauang	113	1
KABUPATEN		5,189	42
ANGKA KEMATIAN BAYI		8,09/1000 Kelahiran Hidup	

3. Prevalensi Stunting

Pada tabel di bawah ini dijelaskan mengenai target dan realisasi pada indikator ketiga yaitu Prevelensi Stunting

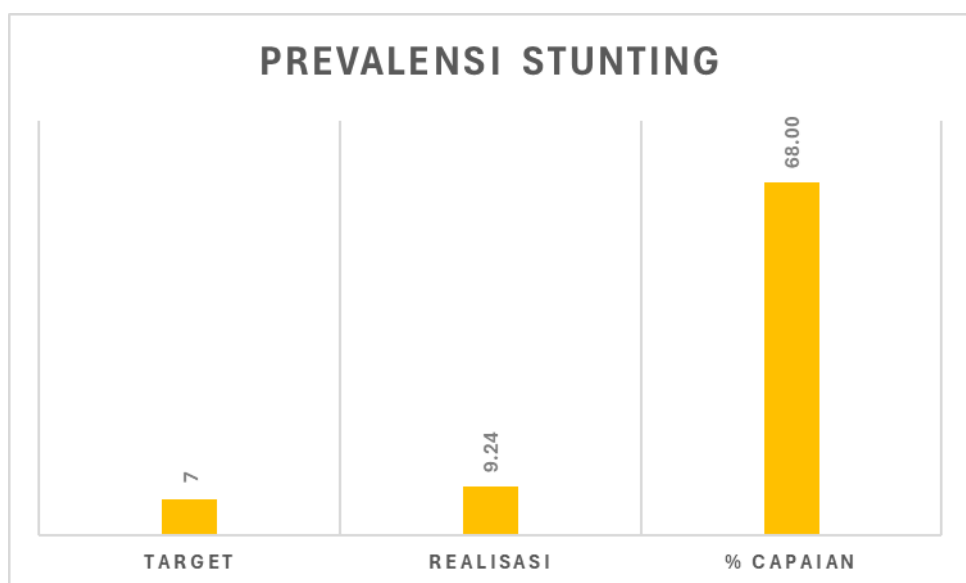
6.

Tabel 3.22 Capaian indikator Prevalensi Stunting Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Prevalensi Stunting	%	7	9.24	68.00

7.

Gambar 3.23 Capaian indikator Prevalensi Stunting

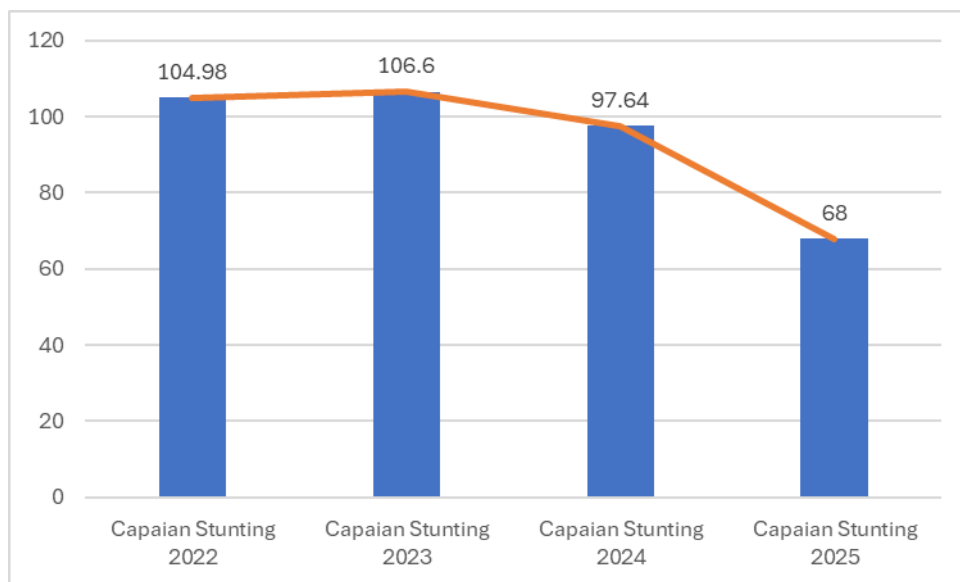


Untuk capaian indikator ketiga “Prevalensi Stunting” dengan target 7%, dicapai tahun 2025 dengan realisasi 9,24%. Dengan demikian maka capaian untuk indikator ini

pada tahun 2025 adalah 68%. Capaian tahun 2025 ini, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dengan capaian 97,6%. Namun jika dilihat dari penurunan prevalensi stunting, dari tahun 2022 sampai tahun 2025 selalu mengalami penurunan yaitu dari tahun 2022 yaitu 10,60%, tahun 2023 yaitu 10%, tahun 2024 yaitu 9,32% dan tahun 2025 yaitu 9,24%. Meskipun menurun, capaian pada tahun 2025 ini tidak mencapai target karena naiknya target kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025. Penurunan prevalensi stunting ini belum mencapai target yang telah ditentukan sesuai dengan versi ePPGBM.

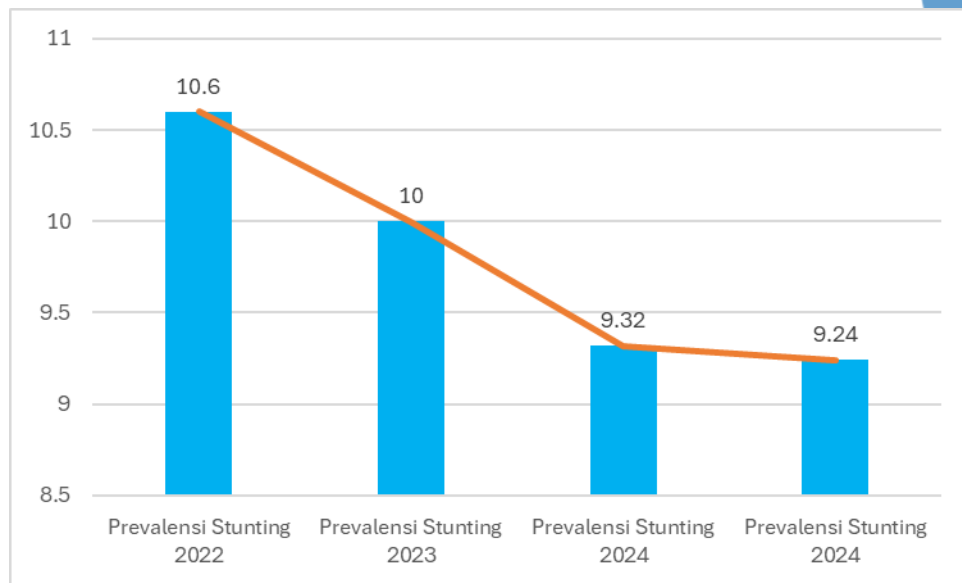
Adapun perbandingan Capaian Dinas Kesehatan berdasarkan target di Renstra untuk Indikator Prevalensi Stunting tahun 2022 – 2025, berdasarkan target pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.25 Perbandingan Capaian Dinas Kesehatan Indikator Prevalensi Stunting tahun 2022 – 2025



Walaupun capaian belum mencapai target sesuai dengan Renstra, namun prevalensi stunting tahun 2022 – 2025 mengalami penurunan sebagaimana pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.24 Perbandingan Realisasi Dinas Kesehatan Indikator Prevalensi Stunting tahun 2022 – 2025



Berdasarkan hasil kumpulan data antropometri balita yang dihimpun dalam Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM), prevalensi stunting Kabupaten Pangkep pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,08% dibanding tahun sebelumnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melakukan penguatan pencegahan stunting dan surveilans gizi dengan melakukan:

1. Pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan di posyandu serta lintas sektor terkait.
2. Peningkatan keterampilan kader dalam melakukan pemantauan tumbuh kembang balita mulai dari penimbangan berat badan dan pengukuran panjang badan/tinggi badan bayi dan balita serta deteksi dini tumbuh kembang balita dengan menggunakan buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) terus dilakukan melalui kegiatan orientasi kader untuk memberikan layanan kesehatan berdasarkan siklus hidup melalui posyandu era baru.
3. Kegiatan pemantauan tumbuh kembang yang dilakukan secara rutin sebagai deteksi dan intervensi dini terhadap permasalahan gizi balita di wilayah kerja puskesmas, termasuk masalah stunting.
4. Kelas Ibu Balita di posyandu yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ibu dalam pengasuhan serta pemantauan tumbuh kembang anak (usia 0-5 tahun) secara optimal melalui penggunaan Buku KIA.
5. Optimalisasi kesehatan ibu hamil dengan memberikan pembekalan edukasi kepada ibu hamil melalui Kelas Ibu Hamil untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan

- kesadaran ibu mengenai kesehatan selama kehamilan, persalinan, nifas, serta perawatan bayi baru lahir untuk mencegah komplikasi.
6. Upaya pencegahan secara dini yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan mempersiapkan kesehatan optimal bagi remaja putri melalui program pemberian tablet tambah darah untuk mencegah dan mengatasi anemia defisiensi zat besi, terutama karena kehilangan darah saat menstruasi dan mendukung pesatnya masa tumbuh kembang. Program ini membantu menjaga kadar hemoglobin (Hb) normal, meningkatkan konsentrasi belajar, menjaga imunitas, serta menjadi investasi kesehatan jangka panjang untuk mencegah stunting pada anak saat mereka hamil di kemudian hari.
 7. Skrining anemia bagi remaja putri juga dilakukan untuk deteksi dini kadar hemoglobin (Hb) rendah, mencegah dampak negatif anemia seperti penurunan konsentrasi dan prestasi belajar, serta memutus rantai risiko anemia pada calon ibu yang dapat menyebabkan kematian ibu melahirkan, bayi prematur, dan stunting.
 8. Adanya Program Pemberian Makanan Tambahan Lokal (PMT Lokal) kepada ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronik) dan balita bermasalah gizi di puskesmas serta dukungan Program Inovasi AKSI STOP STUNTING dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupa penguatan program intervensi penanganan stunting memberikan dampak positif dalam meningkatkan status gizi ibu hamil dan balita sehingga dapat mencegah terjadinya stunting.

Selain intervensi dalam rangka pencegahan stunting, ada juga intervensi yang dilaksanakan pada sasaran balita yang mengalami stunting yaitu pemberian Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) yang merupakan dropping dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Balita stunting yang telah dijangkau oleh puskesmas selanjutnya dirujuk ke RSUD Batara Siang untuk dilakukan skrining lanjutan oleh Dokter Ahli Anak. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dokter Ahli Anak maka seorang balita stunting bisa mendapatkan bantuan PKMK tersebut. Tujuan PKMK ini adalah mengatasi gagal tumbuh pada anak, mengurangi kegagalan pertumbuhan pada anak sakit serta mengejar pertumbuhan anak.

Penguatan koordinasi dan kerja sama Dinas Kesehatan dengan lintas sektor terkait dalam pencegahan stunting berupa upaya intervensi stunting terintegrasi melalui kegiatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif. Upaya yang melibatkan berbagai sektor terkait sampai pada level desa/kelurahan ini memberikan kontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting. Faktor pendukung dari lintas sektor ini kepada dinas kesehatan dan puskesmas diharapkan dapat terus terlaksana demi percepatan penurunan stunting.

Adapun persebaran prevalensi stunting sesuai dengan wilayah kerja puskesmas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.24 Prevalensi stunting Per Puskesmas Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

NO	PUSKESMAS	PREVALENSI STUNTING		
		BALITA DIUKUR	BALITA STUNTING	%
1	KOTA PANGKAJENE	1554	84	5.41
2	BONTO PERAK	1024	137	13.38
3	MINASA TE'NE	1809	139	7.68
4	KALABBIRANG	672	40	5.95
5	BUNGORO	1849	148	8.00
6	BOWONG CINDEA	822	136	16.55
7	LABAKKANG	989	124	12.54
8	TARAWANG	882	193	21.88
9	PUNDATA BAJI	842	57	6.77
10	MA'RANG	1401	232	16.56
11	PADANG LAMPE	503	40	7.95
12	SEGERI	833	87	10.44
13	BARING	487	31	6.37
14	MANDALLE	676	39	5.77
15	BALOCCI	901	62	6.88
16	BANTIMALA	504	52	10.32
17	LK. TUPABBIRING	471	84	17.83
18	SARAPPO	1063	35	3.29
19	SABUTUNG	1187	80	6.74
20	LK. KALMAS	1038	27	2.60
21	PAMANTAUANG	491	37	7.54
22	LK. TANGAYA	1280	101	7.89
23	SAILUS	670	62	9.25
JUMLAH		21,948	2,027	9.24

Capaian kinerja pada sasaran ini dipenagruhi oleh capaian kinerja Program dan Kegiatan mendukung langsung sasaran ini yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.27 Capaian Kinerja Indikator Program dan Kegiatan pada sasaran Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat Tahun 2025

No	Uraian Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
I	Meningkatnya status kesehatan masyarakat					
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	Persen	99.45	99.45
A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Puskesmas/rumah Sakit Yang Memenuhi Standar	100	Persen	99.65	99.65
1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	Unit	1	100.00
2	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1	Unit	1	100.00
3	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	9	Unit	9	100.00
4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2	Unit	2	100.00
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Unit	1	100.00
6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	6	Unit	6	100.00
7	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	4	unit	4	100.00
8	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	574	Paket	552	96.17
9	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangk	1	Unit	1	100.00

No	Uraian Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
10	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2	Paket	2	100.00
11	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	253	Paket	253	100.00
B	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	100	Persen	99.25	99.25
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5265	Orang	5115	97.15
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5265	Orang	5196	98.69
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5027	Orang	5154	100.00
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23525	Orang	23262	98.88
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12	Dokumen	12	100.00
6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	Dokumen	12	100.00
7	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12	Dokumen	12	100.00

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan untuk mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat:
 - a. Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota
 - 1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya.
Kegiatan ini dilakukan di RS Batara Siang meliputi Renovasi Gedung Perawatan Plamboyan, Renovasi Gedung Perawatan Palem, Renovasi gedung Perawatan Seruni-Akasia dan Renovasi Gedung Ruang Teratai.
 - 2) Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
Pembangunan Rumah Dinas Kesehatan yang bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2025 sebanyak 1 unit yang diperuntukkan di Puskesmas Liukang Kalmas.
 - 3) Pengembangan Puskesmas
Pada sub kegiatan ini, telah dilaksanakan Pembangunan dan Rehabilitasi Berat Puskesmas Pundata Baji, Rehabilitasi dan tambah ruang Pembangunan Gedung Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) dan Gedung Manajemen Puskesmas Bantimala, Rehabilitasi dan tambah ruang Pembangunan Gedung Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) dan Gedung Manajemen Puskesmas Baring sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025.

Selain Pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas, adapula Pengadaan Prasarana Puskesmas yang juga bersumber dari anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2025 meliputi : Pengadaan Instalasi Air Bersih Puskesmas Bowong Cindea yang berfungsi untuk menyuling air payau atau air asin menjadi air tawar, Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas sebanyak 2 unit yang diperuntukkan untuk Puskesmas Segeri dan Puskesmas Liukang Tupabbiring, Pengadaan Ambulance Puskesmas Keliling (PUSLING) Roda Empat Puskesmas Liukang Tangaya sebanyak 1 unit.

4) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Pada sub kegiatan ini dilakukan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan di Gedung PSC melalui pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan lainnya dan Lanjutan Pembangunan Aula Dinas Kesehatan.

5) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Kegiatan ini dilakukan di Rumah Sakit Batiling yaitu pembangunan sumur bor dan pemeliharaan Rumah Sakit Batiling.

6) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Pada sub kegiatan ini terdapat rehabilitasi Pustu dan Poskesdes yang terdiri atas rehabilitasi Pustu Panaikang Desa Panaikang wilayah kerja Puskesmas Minasatene, rehabilitasi Poskesdes Buccinri terletak di Keluهران Mappasaile wilayah kerja Puskesmas Kota Pangkajene, Rehabilitasi Poskesdes Biring Ere Desa Biring Ere wilayah kerja Puskesmas Bungoro, rehabilitasi Poskesdes Benteng Desa Benteng wilayah kerja Puskesmas Mandalle, Rehabilitasi Poskesdes Pulau Sapuli Desa Mattiro Baji Kecamatan liukang Tupabbiring utara wilayah kerja Puskesmas Sabutung. Sumber anggaran untuk Rehabilitasi Pustu dan Poskesdes ini dari Pajak Rokok.

7) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pada Sub kegiatan ini terdapat pengadaan Alat Kedokteran Gigi berupa alat dental unit Puskesmas, dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Karanrang.

Di Rumah Sakit Batara Siang Alat Kesehatan di ruang Rawat Inap, rawat jalan, Layanan Intensif, Ruang Gawat Darurat dan Ruang Laboratorium.

8) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pemeliharaan Alat kesehatan yang dilakukan pada sub kegiatan ini berupa kalibrasi alat kesehatan Puskesmas. Kalibrasi alat kesehatan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun bertujuan menjamin tersedianya alat kesehatan yang sesuai standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai di Fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan ini

melibatkan Tenaga Kalibrasi dari BPFAC (Balai Pengamanan Fasilitas dan Alat Kesehatan) Makassar dan dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Pangkep.

9) Pengembangan Rumah Sakit

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan di RS Batara Siang yaitu Pekerjaan Pembangunan Gedung PICU RSUD Batara Siang.

10) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin ketersediaan obat esensial di pusat layanan kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) dan Rumah Sakit. Untuk menjamin efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi maka proses pengadaan obat dilakukan melalui pemanfaatan katalog elektronik (e-Katalog) yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2019.

11) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

Pada sub kegiatan ini proses distribusi obat, vaksin dan BMHP dilakukan setiap bulan dimana Puskesmas melakukan permintaan ke Instalasi Farmasi Kabupaten menggunakan LPLPO. Proses distribusi dilakukan dengan mengantar langsung untuk Puskesmas wilayah daratan dan melalui pihak ke tiga untuk wilayah kepulauan.

b. Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pada Sub kegiatan ini pelaksanaannya di Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Untuk Dinas Kesehatan dilakukan kegiatan Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Pemanfaatan Aplikasi Kesehatan Ibu dan Anak tingkat Kabupaten Pangkep yang pesertanya sebanyak 40 orang yang terdiri dari bidan koordinator dan bidan puskesmas dari 23 Puskesmas. Adapun tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk memaksimalkan Aplikasi program Kesehatan Ibu dan Anak sekaligus dilakukan Evaluasi dan Monitoring dari hasil penginputan aplikasi tersebut.

Di Puskesmas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dilakukan dengan memberikan pelayanan antenatal sesuai standar yang diberikan pada ibu hamil yang meliputi standar kuantitas dan standar kualitas. Kegiatan berupa kelas ibu hamil dan kelas ibu balita yang mana kegiatan kelas ibu hamil adalah program dirancang khusus untuk ibu hamil. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan emosional kepada ibu hamil dalam mempersiapkan diri untuk kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi. Kelas ibu

hamil ini dilaksanakan setiap bulan mulai dari bulan februari sampai bulan Oktober di setiap posyandu yang memiliki ibu hamil. Setiap pelaksanaan kelas ibu hamil diharapkan keluarga terdekat bisa ikut baik itu suami, orangtua maupun mertua.

2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pada Sub Kegiatan Pelayanan kesehatan ibu bersalin, di dalamnya ada kegiatan sewa Tempat Tunggu Kelahiran dan perjalanan dinas pendamping rujukan ibu bersalin.

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah pelayanan yang diberikan pada ibu bersalin sesuai standar yang meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi. Kegiatan dikelas ibu bersalin berupa rapat koordinasi dengan Masyarakat terkait perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) termasuk pemantauan. Kegiatan ini melibatkan lintas sektor yang berada di wilayah kerja puskesmas yang terdiri dari kepala desa, Ibu PKK, kepala dusun, RT/RW, dan ibu kader. Kegiatan ini menghasilkan sebuah kesepakatan agar semua lintas sektor bisa membantu dalam pengawasan ibu hamil yang ada disekitar lingkungannya agar dapat terpantau dengan baik dan maksimal dengan bekerjasama dengan bidan desa.

3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pada Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir pada Dinas Kesehatan dilakukan kegiatan Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Pelayanan Bayi Baru Lahir Tingkat Kabupaten Pangkep yang pesertanya sebanyak 20 orang yang terdiri dari Bidan Pengelola Program SHK dari 23 Puskesmas. Adapun tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk evaluasi dan monitoring pelayanan SHK agar semua bayi baru lahir dapat di SHK dari Januari sampai dengan Desember 2025. Di Puskesmas Pengelolaan Kesehatan dilakukan kegiatan kunjungan lapangan neonates lengkap. Kunjungan ini melibatkan bidan dan Tim Gizi untuk melihat perkembangan Kesehatan dan status gizi bayi baru lahir.

4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Kegiatan ini dilakukan di Dinas Kesehatan dengan melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Balita di 23 Puskesmas. Kegiatan pelayanan kesehatan balita dilakukan di Puskesmas untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita yang di lakukan secara rutin minimal 8 kali sesuai standar untuk memantau tumbuh kembang balita.

5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Pada Subkegiatan ini dilakukan pertemuan Ekspose Penanganan Stunting dan Publikasi Hasil Pengukuran melalui Sigizi Terpadu (Aksi 7) dilaksanakan pada Hari Selasa, 30 September 2025 di Baruga Dewakang, Bungoro yang dihadiri 150 orang peserta dan di buka oleh Bupati Pangkajene

dan Kepulauan. Kegiatan ini merupakan salah satu dari 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang fokus pada pengukuran status gizi, pencatatan, serta diseminasi data prevalensi stunting secara akurat dan transparan. Data ini dikumpulkan dan diinput oleh Petugas Gizi di puskesmas melalui web sigizikesga dan digunakan untuk memantau kemajuan serta merencanakan intervensi. Data yang diperoleh berasal dari pengukuran antropometri balita baik di posyandu, puskesmas dan jejaringnya, maupun kunjungan rumah. Dari hasil pengukuran tersebut (*by name by address*) didapatkan data sebaran stunting di tingkat puskesmas, kecamatan, hingga desa/kelurahan lalu disebarluaskan melalui berbagai saluran (media sosial, pertemuan, atau rapat) untuk memberikan informasi terkini, meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat, serta mempermudah evaluasi kinerja intervensi penurunan stunting. Kegiatan publikasi ini menjadi dasar dalam mengambil kebijakan tindakan selanjutnya (intervensi spesifik dan sensitif) untuk mempercepat penurunan stunting. Pada kegiatan ini juga dilakukan penyerahan banner untuk 13 kecamatan sebagai sarana publikasi tingkat kecamatan. Di Puskesmas pada subkegiatan ini dilakukan kegiatan – kegiatan: Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang, Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi balita gizi kurang, Penyediaan bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil KEK, Kunjungan lapangan pemantauan tumbuh kembang dan masalah gizi ibu dan anak, serta Pendampingan pemberian MP ASI dan ASI eksklusif dan pendampingan rujukan balita stunting / gizi buruk.

6) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan dan puskesmas).

Jaminan Kesehatan Nasional ini menjamin peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional, maka sistem pemeliharaan kesehatan masyarakat akan tertata dengan baik, aspek promotive – preventif - kuratif dan rehabilitatif mendapatkan porsi yang seimbang dan akan terlaksana dengan optimal, tenaga kesehatan akan termanfaatkan dengan baik pada aspek promotif – preventif – kuratif dan rehabilitatif dan seluruh masyarakat akan terlayani dengan baik. Di Puskesmas, pada Sub Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat ada beberapa kegiatan diantaranya belanja jasa medik untuk tenaga kesehatan, belanja modal, belanja BMHP, belanja perjalanan dinas (pertemuan), belanja obat, belanja bahan pembersih dan belanja pemeliharaan gedung.

Gambar 3.28 Dokumentasi kegiatan pada Sasaran Strategis **Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat**





Sasaran 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Kesehatan

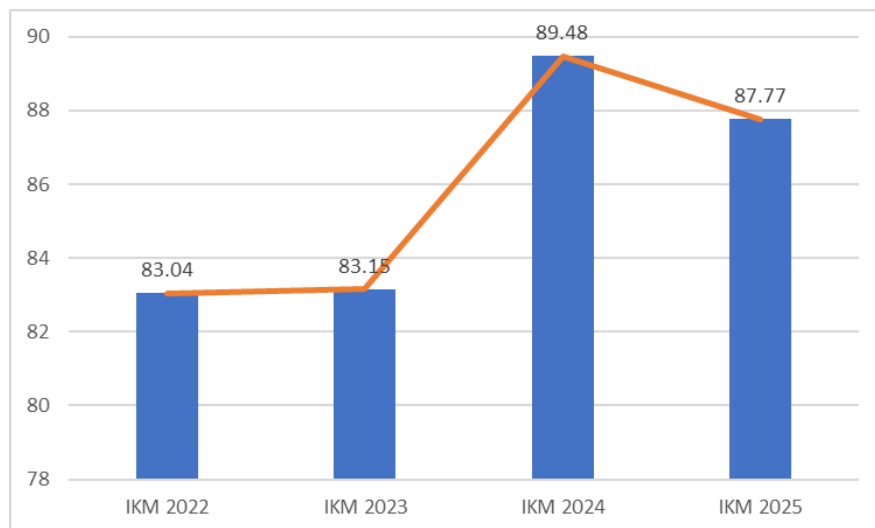
Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.34 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3
(Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Kesehatan)
Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai	78.8	87.77	111.38

Untuk tahun 2025, capaian kinerja indikator pada sasaran 2 menunjukkan kinerja yang *Sangat Tinggi* yaitu 111,38%, Capaian ini hampir sama dari Capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 113,9%. Untuk Realisasi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2022 yaitu 83,04%, tahun 2023 yaitu 83,15% dan tahun 2024 yaitu 89,48% dan tahun 2025 yaitu 87,78% dengan Kategori B (Baik)

Gambar 3.35 Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 – 2025



Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial.

Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan jajarannya sebagai salah satu Perangkat Daerah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Survey ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun tahapan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

1. Persiapan
1. Pelaksana Survei

Pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri oleh Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep.
2. Penetapan Waktu Pelaksanaan Survey

Survey dilakukan setiap bulan sekali dan dibuat dalam bentuk laporan Survei Kepuasan Masyarakat Per Semester di tahun 2025

 - a. Rawat Jalan dan Unit Penunjang dilaksanakan secara Random per bulan sampai mencukupi sampel berdasar Rumus Kreiji Morgan
 - b. Rawat Inap dilaksanakan survei kepada setiap pasien rawat inap yang telah dirawat 2 x 24 jam atau sudah akan dipulangkan sampai memenuhi sampel berdasar Rumus Kreiji Morgan.
3. Persiapan Pelaksanaan
 - a. Penyusunan Kuesioner.

Untuk menyusun IKM ini digunakan kuesioner yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Kuesioner secara umum, hanya 1 lembar yang berisi :

- 1) Judul kuesioner, tanggal dilakukan survey dan unit pelayanan yang disurvei.
- 2) Identitas responden
- 3) Daftar pertanyaan/pernyataan yang terstruktur dengan jawaban pilihan ganda.
- 4) Pilihan jawaban terdiri dari 4 kategori sebagai contoh :
 - a) Tidak baik, diberi nilai persepsi 1
 - b) Kurang baik diberi nilai persepsi 2
 - c) Baik diberi nilai persepsi 3
 - d) Sangat baik diberi nilai persepsi 4

4. Langkah Pengolahan Data

Berikut ini merupakan interpretasi terhadap persepsi penilaian IKM :

Tabel 1 Persepsi Penilaian IKM MUTU PELAYANAN

MUTU PELAYANAN		
A	SANGAT BAIK	88,31 – 100,0
B	BAIK	76,61 – 88,30
C	KURANG BAIK	65,00 – 76,60
D	TIDAK BAIK	25,00 – 64,99

5. Penetapan Responden dan Lokasi

1. Responden ditetapkan berdasarkan Rumus Kreiji Morgan,
2. Lokasi dilaksanakannya survey yaitu di ruang pelayanan langsung, dimana pasien dan keluarga pasien mendapatkan pelayanan, seperti di Ruang Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD, IGD PONEK, ICU, Laboratorium, Farmasi, Radiologi.

6. Cara Pengumpulan Data

Data dikumpulkan per minggu dan dilakukan analisa laporan survey kepuasan masyarakat per tiga bulan atau per Semester sebagai Laporan.

7. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan yang dilakukan secara kuantitatif dengan mempergunakan aplikasi Excel.

8. Penyusunan Laporan

Hasil survey disusun dalam bentuk laporan yang menyajikan informasi tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi. Hasil ini juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pengusulan peningkatan pelayanan publik atau sebagai upaya perbaikan mutu pelayanan yang berfokus pada keselamatan pasien.

Realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.36 Realisasi IKM Lingkup Dinas Kesehatan Kab, Pangkep Tahun 2025

No	Nama Instansi	Nilai IKM
1	RS BATARA SIANG	80.95
2	RS PRATAMA BATILING	83.01
3	RS PRATAMA SAILUS	80.44
4	KOTA PANGKAJENE	83.2
5	BONTO PERAK	84.83
6	MINASATE'NE	85.9
7	KALABBIRANG	88.68
8	BUNGORO	92.24
9	BOWONG CINDEA	85.9
10	LABAKKANG	92.85
11	PUNDATA BAJI	92.24
12	TARAWANG	92.85
13	MA'RANG	89.45
14	PADANG LAMPE	78.21
15	SEGERI	97.5
16	BARING	97.7
17	MANDALLE	84.01
18	BALOCCHI	90
19	BANTIMALA	83.7
20	LK.TUPABBIRING	85.9
21	SARAPPO	88.8
22	SABUTUNG	90.01
23	LK.TANGAYA	81.17
24	SAILUS	85.55
25	LK.KALMAS	89.16
26	PAMANTAUANG	97.82
TOTAL		2282.07
CAPAIAN IKM DINAS KESEHATAN		87.77

Pencapaian Kinerja pada sasaran ini didukung dengan pencapaian kinerja pada indikator kinerja program dan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.37 Capaian Kinerja Indikator Program dan Kegiatan pada sasaran Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Kesehatan Tahun 2025

No	Uraian Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
I	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang kesehatan					
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	Persen	99.89	99.96
A	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	100	Persen	99.89	99.89
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58193	Orang	58215	100.00
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	234424	Orang	235446	100.00
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37657	Orang	37268	98.97
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74460	Orang	73345	98.50
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4688	Orang	4688	100.00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	926	Orang	990	100.00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7464	Orang	9174	100.00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6854	Orang	6877	100.00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	Dokumen	12	100.00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	Dokumen	12	100.00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12	Dokumen	12	100.00
12	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12	Dokumen	12	100.00
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	12	Dokumen	12	100.00
14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12	Dokumen	12	100.00
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1731	Orang	1731	100.00
16	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12	Dokumen	12	100.00
17	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12	Dokumen	12	100.00
18	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	12	Dokumen	12	100.00
19	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	12	Dokumen	12	100.00
20	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	1	100.00
21	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	346	Orang	346	100.00

No	Uraian Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
22	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	58	Orang	58	100.00
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12	Dokumen	12	100.00
24	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12	Dokumen	12	100.00
B	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	persen	100	100.00
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12	Dokumen	12	100.00
C	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar	100	persen	100	100.00
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	1	Unit	1	100.00
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	Persen	100	100.00
A	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kab/kota	2	Kegiatan	2	100.00
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen	1	100.00
2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	1	Dokumen	1	100.00
B	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	1	Kegiatan	1	100.00
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	120	Orang	120	100.00
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Dan Minuman	100	Persen	100	100.00
A	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan	1	Kegiatan	1	100.00
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2	Dokumen	1	50.00
B	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Pengawasan Sarana Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan IRT	1	Kegiatan	1	50.00
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	1	Dokumen	1	
C	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100	Persen	100	100.00
1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	28	Unit	1	

No	Uraian Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	Persen	100	100.00
A	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis Dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Dokumen	1	100.00
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Dokumen	1	

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan untuk mendukung Sasaran Strategis **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Kesehatan** didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat:

a. Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Di Dinas Kesehatan dilakukan Kegiatan pertemuan pengelola Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 14 Mei 2025 dengan peserta berasal dari Pengelola UKS Puskesmas 23 Orang. Melalui kegiatan pertemuan pengelola UKS Puskesmas ini, diharapkan terjalin koordinasi dan sinergi yang lebih baik antara Puskesmas, sekolah, dan lintas sektor dalam pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengelola UKS dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan UKS secara terarah dan berkesinambungan. Selain itu, pertemuan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang sehat, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada peserta didik, serta mendukung tumbuh kembang anak sekolah secara optimal.

Di Puskesmas dilakukan kegiatan Pembinaan Kesehatan sekolah termasuk (Skrining Kesehatan) pada usia sekolah dan remaja dan posyandu milenial. Pembinaan Kesehatan disekolah dengan melakukan skrining kesehatan pada kelas 1 sampai dengan kelas 9 dan dilaksanakan pada siswa baru. Selain itu dilakukan juga Kegiatan Posyandu Milenial yang dilaksanakan di setiap Desa dengan sasaran anak umur 10-18 tahun.

2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Di Dinas Kesehatan dilakukan Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Pemanfaatan Aplikasi Kesehatan usia produktif Tingkat Kabupaten Pangkep yang pesertanya sebanyak 37 orang yang terdiri dari Bidan pengelola program calon pengantin dari 23 Puskesmas. Adapun tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk memaksimalkan Aplikasi KESCATIN sekaligus dilakukan Evaluasi dan Monitoring dari hasil penginputan Aplikasi tersebut.

Sedangkan di puskesmas berupa skrining/deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular di Instansi.

3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Di Dinas Kesehatan dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis dan penguatan Puskesmas Santun Lansia dan Perawatan Jangka Panjang (PJP). Adapun sasarannya adalah Puskesmas dan Posyandu yang melaksanakan pelayanan lanjut usia dan perawatan jangka panjang (PJP) di 23 Puskesmas. Bagi Lansia yang mengalami gangguan kemandirian sedang, berat dan total yang memerlukan perawatan jangka panjang (PJP). Adapun tujuannya yaitu memberikan bimbingan kepada pengelola program lanjut usia puskesmas tentang pelayanan kesehatan lanjut usia di Puskesmas dan Posyandu. Melihat secara langsung pelayanan yang diberikan kepada sasaran terutama mengenal skrining SKILAS dan pelaksanaan Kluster 3 di Puskesmas serta alur pelayanannya.

Di Puskesmas Kegiatan ini berupa Edukasi lansia oleh petugas di Posyandu lansia.

4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Di Dinas Kesehatan dilakukan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan SPM Hipertensi dengan penyediaan ATK untuk kegiatan tersebut. Sedangkan di puskesmas dilakukan kegiatan pendampingan dan pemantauan penderita hipertensi melalui metode kelompok.

5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Di Dinas Kesehatan dilakukan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan SPM diabetes melitus dengan penyediaan ATK untuk kegiatan tersebut. Sedangkan di puskesmas dilakukan kegiatan pendampingan dan pemantauan penderita diabetes melitus melalui metode kelompok.

6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Di Dinas Kesehatan dilakukan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan SPM ODGJ dengan penyediaan ATK untuk kegiatan tersebut. Sedangkan di puskesmas dilakukan kegiatan berupa pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat.

7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Di Dinas Kesehatan dilakukan Kegiatan Pertemuan Penguatan SPM Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang dihadiri 27 Orang Pengelola program TBC dari 23 Puskesmas, 2 Rumah Sakit dan 2 Klinik. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan penguatan kepada pengelola program dalam meningkatkan capaian penemuan terduga dan kasus TBC.

Sedangkan di Puskesmas dilakukan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan pada orang terduga TBC sesuai standar, yang meliputi :

- Pemeriksaan Klinis berdasarkan gejala dan tanda
- Pemeriksaan Penunjang dan
- Edukasi

Di Puskesmas, kegiatan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis terdiri dari 2 kegiatan, terdiri dari Investigasi kontak TB yang merupakan proses untuk mengidentifikasi dan mengawasi orang-orang yang telah berkontak dengan seseorang yang terinfeksi TB dengan tujuan untuk mendeteksi TB pada tahap awal dan mencegah penyebaran penyakit, mengidentifikasi orang-orang yang beresiko tinggi terkena TB, memberikan pengobatan dan pencegahan yang tepat.

8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Di Dinas Kesehatan dilakukan Kegiatan Pertemuan Penguatan SPM Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui target sasaran SPM, Mengetahui Sasaran SPM dan Sosialisasi PKM SPM terbaru No. 6 tahun 2024.

Di Puskesmas dilakukan kegiatan pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar, yang meliputi edukasi perilaku beresiko dan skrining. Orang dengan resiko terinfeksi virus HIV yaitu Ibu hami, Pasien TBC, pasien infeksi menular seksual (IMS), penaja seks, LSL, transgender, pengguna NAPZA, warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan pengelolaan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV berupa pelaksanaan mobile tes HIV dan IMS pada populasi kunci.

9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

Di Dinas Kesehatan dilakukan Kegiatan Workshop Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB. kegiatan ini bertujuan agar peserta mampu menjelaskan konsep dasar dan penerapan epidemiologi dalam KLB/Wabah, mampu menjelaskan konsep surveilans epidemiologi AFP dan penanggulangan KLB Polio/Campak Rubella dan mampu membuat laporan hasil penyelidikan epidemiologi.

10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Di Dinas Kesehatan dilakukan Kegiatan:

- Pengukuran Kebugaran Jasmani Calon Jamaah Haji. Tujuan utama dari kegiatan pengukuran kebugaran jasmani bagi calon jemaah haji adalah untuk mengetahui tingkat kebugaran dan kesiapan fisik jemaah agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan nyaman. Sasaran peserta kegiatan ini adalah calon jamaah haji.
- Pengukuran Kebugaran Jasmani ASN dan Non ASN. Simulasi Tanggap Darurat Bencana Kebakaran dan penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Tujuan kegiatan adalah simulasi tanggap darurat bencana kebakaran dan simulasi alat pemadam api ringan merupakan suatu upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan keselamatan pekerja melalui peningkatan pemahaman dan kemampuan menghadapi keadaan darurat bencana kebakaran ditempat kerja.
- Media Komunikasi Informasi Edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan kesehatan kerja.
- Skrining kebugaran jasmani calon haji, anak sekolah, usia produktif.

11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pada Sub Kegiatan ini disediakan Jasa Pengolahan Sampah Pengangkutan dan Pengolahan Limbah Medis dan B3. Kegiatan Pengangkutan limbah B3 Puskesmas dilakukan untuk memusnahkan sampah berbahaya menggunakan alat khusus, sehingga lingkungan sekitar puskesmas tetap aman dan sehat serta untuk menghindari penularan penyakit pada masyarakat yang bermukim disekitar puskesmas. Sedangkan di puskesmas dilakukan kegiatan – kegiatan:

- Inspeksi Kesehatan lingkungan tempat-tempat umum (TFU), kegiatan ini meliputi pemeriksaan Kesehatan lingkungan di kantor-kantor pemerintahan maupun di sekolah - sekolah.
- Inspeksi Kesehatan Lingkungan tempat pengajian pangan. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan Kesehatan lingkungan di sekitar warung makan, kantin sekolah, jajanan sekolah, tempat - tempat penjual makanan.
- Inspeksi Kesehatan lingkungan sarana tempat air minum. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan kualitas air di depot - depot yang berada di wilayah kerja puskesmas.
- Pengambilan sampel untuk surveilans kualitas air minum di tingkat rumah tangga. Kegiatan ini berupa pemeriksaan kualitas air minum ditingkat rumah

tangga untuk melihat sejauh mana kualitas air minum yang dikonsumsi di rumah tangga. Kegiatan ini termasuk ingin melihat apakah anak stunting mengonsumsi air yang layak minum atau tidak.

- Pengelolaan Surveilans Kesehatan. Didalam pengelolaan surveilans Kesehatan ada beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya: Survey Vektor DBD, kegiatan ini berupa kunjungan lapangan di desa dengan mengamati tempat-tempat penampungan air yang bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk *Aedes Aegypti*, membagikan bubuk abate, memberikan edukasi kepada Masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan mencegah perkembangbiakan nyamuk dengan 3 M Plus, yaitu menguras tempat penampungan, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bernilai agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk dan Plusnya yaitu membudidayakan ikan pemakan jentik, memasang kawat kasa, menjaga kebersihan lingkungan, memeriksa tempat-tempat penampungan air dan meletakkan baju bekas pakaian dalam wadah tertutup. Selain itu dilakukan juga kegiatan larvasidasi DBD, Kegiatan ini merupakan salah satu cara pengendalian vektor DBD (Nyamuk *Aedes Aegypti*). Pada surveilans kesehatan ini juga dilakukan verifikasi Sinyal/penyelidikan Epidemiologi (PE) pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB/Wabah dan penyakit infeksi Emerging. Kegiatan ini berupa kunjungan lapangan ke rumah warga yang menderita penyakit DBD, Diare, pneumonia dan penyakit lainnya yang masuk di kriteria penyakit diatas dan melakukan pemeriksaan Kesehatan pasien, penyelidikan epidemiologi dan edukasi kepada keluarga dan tetangga dari pasien. Kegiatan ini dilaksanakan jika pasien sudah keluar dari Puskesmas atau RS.

12) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Sub Kegiatan ini terdiri dari 5 Kegiatan Penggerakan yaitu :

- Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, KIA), peserta dari kegiatan ini berjumlah 270 Orang berasal dari perwakilan Usia Produktif Dan Lansia dari Kelurahan dan Desa sekecamatan Marang Kabupaten Pangkep serta dari Camat, Pejabat Lintas Sektor, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Staf Puskesmas. Melalui Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan KIA), diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan dan deteksi dini penyakit, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit prioritas, serta memperkuat peran fasilitas kesehatan dalam pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara berkelanjutan.

- Gerakan Posyandu Aktif, peserta dari berasal dari Camat, Pejabat Lintas Sektor, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Staf Puskesmas Sabutung, Tim Penggerak PKK dan Kader Posyandu sebanyak 270 orang. Kegiatan Gerakan Posyandu Aktif dilaksanakan di Pulau Sabutung Desa Mattiro Kanja Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara. Diharapkan melalui Gerakan Posyandu Aktif yang kini dikenal sebagai Posyandu Era Baru, Posyandu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga sebagai pusat pelayanan terpadu yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan layanan siklus hidup, Posyandu Era Baru diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat peran kader, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan.
- Gerakan Aksi Bergizi peserta dari berasal dari Peserta berasal santri Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah, Tenaga Kesehatan, Anggota Pramuka, Guru, serta Stakeholder terkait berjumlah 270 Orang. Kegiatan Gerakan Aksi Bergizi dilaksanakan di Pondok Pesantren Assiratahl Mustaqim DDI Baru - Baru Tanga Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Diharapkan melalui Gerakan Aksi Bergizi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja tentang pentingnya gizi seimbang, membentuk kebiasaan hidup sehat, serta mencegah masalah gizi seperti anemia dan gizi kurang, sehingga terwujud generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan.
- Gerakan Cegah Stunting, peserta berasal kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh Agama, serta stakeholder terkait berjumlah 270 orang. Kegiatan Gerakan Cegah Stunting ini dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Desa Taraweang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tanggal 18 September 2025. Harapan dari kegiatan Gerakan Cegah Stunting ini adalah agar mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi sejak dini, mendorong perubahan perilaku hidup sehat, serta memperkuat peran keluarga dan lintas sektor dalam pencegahan stunting, sehingga dapat mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan.
- Gerakan Ibu Hamil Sehat, Peserta berasal Ibu Hamil, kader Posyandu, Tenaga Kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh Agama, serta stakeholder terkait berjumlah 270 orang. Gerakan Ibu Hamil Sehat dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Harapan dari kegiatan Ibu Hamil Sehat adalah agar para ibu hamil memperoleh pengetahuan dan pendampingan yang cukup dalam menjaga kesehatan selama kehamilan, rutin

memeriksa kehamilan, serta menerapkan pola hidup dan gizi seimbang, sehingga dapat melahirkan generasi yang sehat, selamat, dan berkualitas.

13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya.

Pada sub kegiatan ini dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Tradisional kepada pengelola di 23 Puskesmas. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan Puskesmas dapat menyediakan akses layanan kesehatan yang lebih luas, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh pelayanan kesehatan modern, serta untuk melestarikan dan memanfaatkan kearifan lokal dalam upaya menjaga kesehatan dan mengatasi gangguan kesehatan.

14) Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Di Dinas Kesehatan dilakukan beberapa kegiatan diantaranya:

- Pembinaan dan supervisi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit (surveilans PD3I, Pelaksanaan Surveilans dan Respon KLB/Wabah, surveilans aktif RS/faskes, dan pemantauan rekomendasi pemetaan risiko penyakit infeksi) dilaksanakan dari bulan Januari hingga November 2025 adapun kegiatan dilaksanakan sebanyak 145 kali dalam pembinaan/pendampingan di Puskesmas/RS/Klinik.
- Pertemuan Review SKDR, Surveilans AFP dan PD3I Lainnya yang dilaksanakan Aula Dinkes. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan peningkatan kapasitas bagi pengelola program surveilans, aktif dalam penemuan kasus AFP dan PD3I Lainnya di Puskesmas masing - masing.
- Verifikasi sinyal/rumor, PE/pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB/Wabah, investigasi kasus KIPI, serta PE penyakit menular lainnya, keracunan makanan dilaksanakan dari Januari sampai November 2025 yang dilakukan sebanyak 150 Kali.
- Kegiatan Validasi Data Sasaran/Cakupan Penemuan Kasus dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dilaksanakan di setiap semester. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan validasi atau akurasi Pelaporan Program di Puskesmas maupun Rumah sakit/Klinik.

Sedangkan di Puskesmas dilakukan kegiatan Survey Vektor DBD, Larvasidasi DBD dan Verifikasi Sinyal/penyelidikan Epidemiologi (PE) pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB/Wabah dan penyakit infeksi Emerging.

15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

Kegiatan dilakukan di puskesmas berupa pelaksanaan skrining dan intervensi hasil skrining masalah Kesehatan jiwa di Masyarakat dan sekolah.

16) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Pada Sub Kegiatan ini dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

- Kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (penyakit DM, hipertensi, jantung, stroke, PPOK, kanker payudara, kanker leher rahim, gangguan indera penglihatan)
- Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, malaria, DBD, kusta, tifoid, ISPA/Pneumonia, diare, HIV, hepatitis dan penyakit menular lainnya).
- Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dilaksanakan di setiap semester. Kegiatan Rapat koordinasi ini bertujuan untuk Rencana Aksi Daerah TBC dan Tim Percepatan Penanggulangan TBC Kab Pangkep dan Penandatanganan Kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait serta Lembaga-lembaga lain dalam penanggulangan TBC di Kab Pangkep.
- Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Program PISP dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Diare dan Tifoid, Meningkatkan tatalaksana kasus tifoid dan Diare, Meningkatkan Pencatatan dan pelaporan program penyakit tifoid dan Diare.
- Workshop Program Imunisasi dan deseminasi hasil assesment Introduksi Vaksin baru (Korim dan Farmasi) dilaksanakan di Aula Dinas Kesehata. Tujuan kegiatan ini yaitu pengelola mampu melaksanakan imunisasi dan dapat mengelola vaksin rotavirus, dapat mengelola vaksin PCV, mengelola Vaksin HPV dan mengelola Vaksin IPV.
- Monitoring dan Evaluasi program Imunisasi.

Di Puskesmas dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

- Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pelaksanaan imunisasi. Kegiatan ini berupa pelatihan kepada kader posyandu.
- Pemberdayaan Kader pemucuan STBM merupakan pertemuan dengan kader posyandu sebagai Upaya meningkatkan kemampuan kader Kesehatan dalam rangka mengajak Masyarakat merubah perilaku higienis dan saniter.
- Deteksi/penemuan dini/skrining faktor resiko dan penyakit tidak menular prioritas di Masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengidentifikasi faktor resiko, mendeteksi gejala awal, mengoptimalkan pengelolaan penyakit, meningkatkan kesadaran Masyarakat dan mengurangi biaya pengobatan.

- Intensifikasi penemuan kasus kusta frambusia di sekolah. Merupakan Upaya untuk meningkatkan kesadaran, deteksi dini, dan penanganan penyakit kusta.
- Insentififikasi penemuan kasus kusta frambusia di Masyarakat. Merupakan Upaya untuk meningkatkan kesadaran, deteksi dini, dan penanganan penyakit kusta.
- Pelaksanaan Imunisasi. Pelaksanaannya terdiri dari : Bulan imunisasi Anak sekolah (BIAS) dilaksanakan di triwulan 3 sampai triwulan 4, Sweeping BIAS, Pelaksanaan Imunisasi Rutin, Sweeping Imunisasi Rutin, DOFU (Drop Out Follow Up) dan Skrining Status Imunisasi Td pada WUS (Ibu Hamil dan Tidak Hamil).
- Pemantauan dan Penjangkauan Lost to Follow Up HIV AIDS dan PIMS.
- Pemantauan Minum Oralit dan Zinc. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan edukasi dan pemantauan Minum obat Zinc dan Oralit terhadap pasien pasca rawat inap yang terdiagnosa Diare.
- Pemberian Obat Pencegah Massal (POPM) kecacingan.
- Pemberian Obat pencegahan Masal (POPM) dilakukan di beberapa lokasi tergantung dari sasaran pemberiannya.
- Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) untuk pencegahan Kusta (kemorofilaksis kusta).
- Penemuan Kasus Hepatitis B (HbsAg reaktif) pada bayi usia 9-12 bulan dan pemantauan ibu hamil reaktif HbsAg.
- Penemuan Kasus PD3I. Kegiatan ini dilakukan dengan kunjungan rumah dengan mendatangi masyarakat yang diduga atau ada gejala yang mengarah ke penyakit PD3I (AFP, Campak dan lain sebagainya).

17) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Pada Sub Kegiatan ini dilakukan kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka Penilaian Kabupatn Kota Sehat, Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat dan Kegiatan Forum Kabupaten sehat meliputi Rapat Koordinasi Anggota Forum dan Rapat Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Kelembagaan Kabupaten/Kota Sehat yang melibatkan Tim Pembina, Anggota Forkom Kecamatan Sehat, Satgas Desa/Kelurahan serta Anggota Forum yang berjumlah 150 orang.

18) Operasional Pelayanan Puskesmas

Didalam Pengelolaan Belanja Operasional Puskesmas terdiri dari sumber anggaran DAK dan Anggaran DAU. Beberapa kegiatan diantaranya Tambahan penghasilan bagi ASN (DAK), belanja Barang (DAK), Belanja Jasa (DAU) dan Belanja perjalanan Dinas (DAK) yang semuanya diperuntukkan untuk membiayai Operasional Puskesmas termasuk didalamnya penyediaan biaya air, listrik, laundry.

19) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Untuk Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Bidang Kesehatan tentunya harus didukung Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan laboratorium berupa: Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas, Bahan-Bahan Lainnya berupa Bahan Pembersih dan Reagen, Belanja alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos, Belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan kantor -Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan urusan Kesehatan, Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya.

20) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Pada Sub Kegiatan ini dilakukan kegiatan Sistem Penanggulangan Kegawat Daruratn Terpadu Bantuan Hidup Dasar. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah Terlaksananya penanganan korban dan evakuasi dengan cepat dan tepat, mempercepat respon time penanganan korban kegawatdaruratan pra Rumah Sakit, mempercepat proses evakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat dan mencegah kecacatan dan risiko kematian bagi pasien dengan kondisi darurat.

21) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis.

22) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

23) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi adalah upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi. Pelayanan ini meliputi berbagai aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Pelayanan kesehatan reproduksi terpadu (PKRT) meliputi: Pelayanan kesehatan ibu, Keluarga berencana, Kesehatan reproduksi remaja, Pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual (IMS). Kegiatan meliputi Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas.

24) Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan

Kegiatan ini berupa pemantauan lansia risti dan pelayanan Home Care pada lansia dengan PJP oleh petugas puskesmas.

b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi:

1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

- Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan profil dinas kesehatan kabupaten Pangkep dan Penyusunan Profil Sumber Daya Manusia

Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep.

- Kegiatan Pertemuan Penyajian Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan koordinasi dalam rangka melakukan pembaharuan data sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, baik di tingkat Rumah Sakit maupun Puskesmas melalui Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK).

c. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Tujuan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan yaitu regulasi masih terfragmentasi dan belum ada regulasi yang eksplisit mengatur mutu pelayanan kesehatan, Monitoring dan evaluasi belum konsisten dan data belum digunakan secara optimal, Organisasi yang terlibat dalam peningkatan mutu belum memiliki kejelasan peran dan tanggung jawabnya, Sistem akreditasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan budaya peningkatan mutu, Kesulitan dalam mengakses dan aplikasi Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan (PNPK) secara konsisten, Berbagai institusi mengembangkan berbagai indikator mutu yang berbeda dan indikator belum dapat meningkatkan mutu secara optimal, Belum ada dokumentasi yang baik terkait efektivitas berbagai intervensi peningkatan mutu, Belum ada pembagian tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas dari setiap level institusi dalam peningkatan mutu, Perbedaan situasi dan kapasitas antar fasilitas kesehatan membutuhkan intervensi yang berbeda dalam peningkatan mutu, dan Masyarakat masih kurang aktif dalam menyampaikan aspirasinya terkait layanan kesehatan kepada pemangku kepentingan yang berwenang.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pada sub kegiatan ini, dilakukan perhitungan kebutuhan SDM berdasarkan analisis beban kerja melalui perhitungan pada aplikasi Renbut-ABK, agar dapat menentukan perencanaan kebutuhan SDM pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan dengan lintas sektor dan para pengelola renbut-ABK puskesmas, rumah sakit, dan labkesmas se kabupaten Pangkep.

2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pada sub kegiatan ini dilakukan kegiatan Kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2025 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun yang bertujuan :

- Memberikan penghargaan atas pengabdian, prestasi kerja, dan atau inovasi serta peran serta aktif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam mendorong keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan
- Meningkatkan motivasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk melakukan pengabdian, inovasi dan meningkatkan prestasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Mempertahankan kinerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatannya
- Menjadikan para Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan sebagai *agent of change* yang dapat menginspirasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan lainnya untuk memberikan kontribusi pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini terdiri dari 2 Kegiatan Pelatihan yang Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Angkatan I dan Angkatan II. Pelatihan ini berjumlah masing-masing 30 Orang Peserta dari Puskesmas di Lingkup Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Pada kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan Kapasitas Pengelola Program Kesehatan Jiwa di Fasilitas Kesehatan angkatan 1 dan 2.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub kegiatan ini berupa Pembinaan dan pengawasan distribusi alat kesehatan di sarana penyalur khususnya di Apotek dan OPTIK di wilayah Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya alat kesehatan yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan alat kesehatan. Pembinaan dan Pengawasan

dilakukan dengan kunjungan langsung ke sarana penyalur alat kesehatan dan OPTIK, kemudian dilakukan Pertemuan Evaluasi Pembinaan dan Pengawasan.

- b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Pada kegiatan ini diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan produksi dan peredaran Pangan Industri Rumah Tangga serta untuk mewujudkan tertib administrasi di bidang sertifikasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebagai dukungan terhadap UMKM khususnya Industri Rumah Tangga Pangan (IRT). Untuk kegiatan ini tersedia anggaran sebesar Rp. 95.822.000 dan pelaksanaan kegiatannya dengan melaksanakan pengawasan dalam rangka pemenuhan komitmen penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan juga menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha yang diprioritaskan bagi pemilik atau penanggung jawab (Industri Rumah Tangga Pangan) yang belum pernah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dan sedang dalam tahap pemenuhan komitmen dalam rangka penerbitan SPP-IRT serta pemilik usaha yang akan memperpanjang izin PIRT melalui Aplikasi SPPIRT yang terintegrasi OSS RBA.

- c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

- 1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan Sampling dan pengujian sampel di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dan juga menyelenggarakan kegiatan Desk Tindakan Perbaikan dan Pencegahan/CAPA Iklan dan Hasil Penandaan dan Pengujian Bagi Pelaku Usaha yang dianggap belum memenuhi kriteria dalam hal penyajian promosi iklan, penandaan dan juga hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

a. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Bimbingan teknis dan Supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Kegiatan ini berupa Asessment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh Puskesmas.

Gambar 3.36 Dokumentasi kegiatan pada Sasaran Strategis **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Kesehatan**



Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

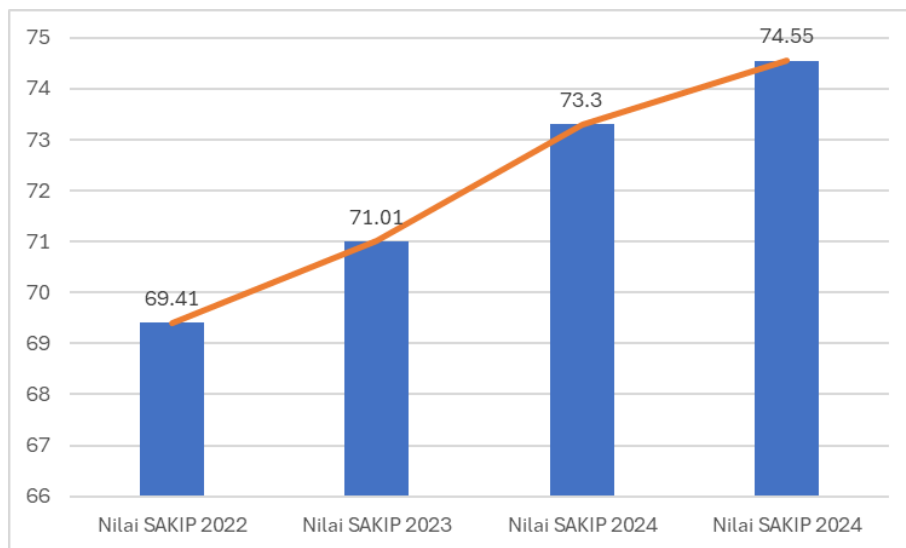
Capaian masing - masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.44 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4
(Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja) Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai	70	74.55	106.50

Pada tahun 2025, capaian kinerja indikator pada sasaran 3 menunjukkan kinerja yang *Sangat Tinggi* yaitu 106,50%, untuk capaian Nilai SAKIP Dinas Kesehatan juga mengalami peningkatan pada tahun 2024 yaitu 104,71% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 100% dan tahun 2023 yaitu 101.44%. Untuk realisasi nilai SAKIP tahun 2022 yaitu 69,41 (B), tahun 2023 yaitu 71,01 (BB), tahun 2024 yaitu 73,3 (BB) dan tahun 2025 yaitu 74,55 (BB).

Gambar 3.45 Nilai SAKIP Tahun 2022 - 2025
Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP, Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari SAKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kab. Pangkep tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Nomor 800.1.11.1/161/inspektorat tanggal 29 Januari 2024. Laporan hasil Evaluasi SAKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Kab. Pangkep pada tahun 2023, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini di jelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluasi dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Tabel 3.46 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot Komponen (%)	Total Nilai (%)
Perencanaan Kinerja	30	21.00
Pengukuran Kinerja	30	24.00
Pelaporan Kinerja	15	11.55
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.00
Nilai Hasil Evaluasi	100	74.55
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 74,55 dengan Predikat BB (SANGAT BAIK). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa AKIP mulai terwujudnya efesiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah di lakukan sampai level eselon 3/koordinator.

Tabel 3.47 Capaian Kinerja Indikator Program dan Kegiatan pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Uraian Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
DINAS KESEHATAN						
I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	100	Persen	100	100.00
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Data Untuk Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	100	100.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26	Dokumen	26	100.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26	Dokumen	26	100.00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	26	Dokumen	26	100.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	26	Dokumen	26	100.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	100.00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	100.00
8	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	1	100.00
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	100	100.00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1361	Orang	1361	100.00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	12	100.00
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Dokumen	12	100.00
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Data Untuk Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah	100	Persen	100	100.00
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	12	100.00
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	12	100.00
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	100	100.00
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150	Paket	150	100.00
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	12	100.00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	12	100.00
4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	4	100.00
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140	Orang	140	100.00
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	100	100.00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	10	100.00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24	Paket	24	100.00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	4	100.00

No	Uraian Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4	Dokumen	4	100.00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	40	Laporan	40	100.00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254	Laporan	254	100.00
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	100	100.00
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17	Unit	17	100.00
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	100	100.00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	4	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	4	Laporan	4	100.00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Laporan	12	100.00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	4	100.00
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	Bulan	100	100.00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18	Unit	18	100.00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20	Unit	20	100.00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	3	100.00
I	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100	Persen	100	100.00
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	24	Unit Kerja	24	100.00

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan untuk mendukung Sasaran Strategis **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan** didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilakukan untuk penyusunan dokumen perencanaan tingkat Kabupaten pangkajene dan kepulauan terdiri dari:

- Penyusunan perencanaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan tahun 2025
- Penyusunan Renja Tahun 2025 Dinas Kesehatan
- Kegiatan Penandatanganan Kinerja dan penyusunan dokumen lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2025
- Penyusunan Rencana Aksi Dinas Kesehatan tahun 2025
- Penyusunan Dokumen IKU Lingkup Dinas Kesehatan tahun 2025
- Penyusunan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2025

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Kegiatan ini dilakukan untuk penyusunan dokumen RKA Dinas Kesehatan yaitu penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), jilid dan penggandaan dalam rangka penyusunan perencanaan penyusunan RKA Dinas Kesehatan Tahun 2025.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Kegiatan ini dilakukan untuk penyusunan dokumen RKA Perubahan Dinas Kesehatan yaitu penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), jilid dan penggandaan dalam rangka penyusunan perencanaan penyusunan RKA Dinas Kesehatan Tahun 2025.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Kegiatan ini dilakukan untuk penyusunan dokumen DPA Pokok Dinas Kesehatan yaitu penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), jilid dan penggandaan dalam rangka penyusunan perencanaan penyusunan RKA Dinas Kesehatan Tahun 2025.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Kegiatan ini dilakukan untuk penyusunan dokumen DPA Perubahan Dinas Kesehatan yaitu penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), jilid dan penggandaan dalam rangka penyusunan perencanaan penyusunan RKA Dinas Kesehatan Tahun 2025.
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini dilakukan untuk penyusunan laporan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Tahun 2025 dan Sosialisasi SAKIP Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi pelayanan dibidang kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di tahun 2025.
 - 8) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penganggaran dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kesehatan selama Tahun 2025 sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penganggaran dilakukan untuk pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Pegguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan,

Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang). Selain itu juga dilakukan untuk Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Jasa Tenaga Harian Lepas Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025 dan juga Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan yang terdiri dari Belanja Penggandaan dan Honor Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan ini dilakukan untuk penyusunan Laporan Prognosis Anggaran Dinas Kesehatan yaitu penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Penggandaan dalam rangka Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2025.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan ini dilakukan untuk penyusunan laporan Inventaris Barang/Aset Dinas Kesehatan yaitu penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), penggandaan, perjalanan dinas dalam rangka pengelolaan inventaris Barang/Aset Dinas Kesehatan Tahun 2025.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan ini dilakukan untuk pendukung bagi terselenggaranya peningkatan disiplin aparatur di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025.

2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

3) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

4) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memonitoring dan evaluasi kinerja di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024. Dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan yaitu di Bulan April, Juli, November dan Desember 2025.

5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Bimtek Pengelolaan Keuangan Bidang dan Puskesmas dan Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan yaitu Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Bahan Cetak Sertifikat, Spanduk, Dokumentasi dan Penggandaan, Makanan dan Minuman Rapat, Honor Narasumber, Belanja Sewa Hotel, Belanja Kursus Singkat/Pelatihan

dan Perjalanan Dinas Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Bidang dan Puskesmas.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan ini berupa penyediaan alat-alat listrik kebutuhan kantor Dinas Kesehatan dan Gudang Farmasi serta penambahan daya listrik pada kantor Dinas Kesehatan.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini berupa penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan alat serta bahan pembersih untuk operasional pada kantor Dinas Kesehatan dan Gudang Farmasi selama tahun 2025.
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Kegiatan ini berupa penyediaan barang cetakan yaitu penggandaan, spanduk, Map dan Amplop pada kantor Dinas Kesehatan yang dapat menunjang pelaksanaan operasional kantor Dinas Kesehatan.
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini berupa penyediaan Bahan Bacaan seperti Surat Kabar, Majalah atau Buletin berlangganan setiap bulannya
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 7) Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang ketersediaan makan minum bagi tamu yang berkunjung ke kantor Dinas Kesehatan.
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas baik di dalam maupun diluar daerah dan biaya makan minum dalam rangka penyelenggaraan Rapat Koordinasi lingkup Dinas Kesehatan.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini berupa penyediaan benda pos yaitu materai dan jasa pengiriman untuk menunjang kelancaran operasional kantor Dinas Kesehatan.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini meliputi ketersediaan pembayaran belanja Tagihan Air, Tagihan Listrik, Tagihan Internet, Pemeriksaan Sampel air pada kantor Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama dan Gudang Farmasi Tahun 2025
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor berupa pembayaran retribusi sampah dan jasa petugas kebersihan pada kantor Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pratama dan Gudang Farmasi.

- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan ini dimaksudkan agar kendaraan Dinas Jabatan (Kendaraan Dinas Kepala Dinas) tetap terpelihara, layak digunakan dan terbayarkan pajak kendaraannya setiap tahun
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan ini dilakukan untuk membuat kondisi sarana dan prasarana tetap terjaga dengan baik dan menghindari kerusakan terlalu dini.
- i. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Gambar 3.48 Dokumentasi kegiatan pada Sasaran Strategis **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan**



3.2.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

A. Capaian SPM

Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.52 Capaian SPM Kesehatan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					TUNTAS UTAMA	99.04%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					97.50%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					77.72%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Orang	5,265	5,115	150	97.15%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19.78%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.90%
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	740	2,849	-2109	100.00%
	2. Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	998,100	1,314,532	-316432	100.00%
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	5,545	7,880	-2335	100.00%
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	5,545	9,764	-4219	100.00%
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	5,545	5,392	153	97.24%
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	832	4,865	-4033	100.00%
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	5,545	7,808	-2263	100.00%
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	5,545	5,545	0	100.00%
	9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	5,545	5,558	-13	100.00%
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	202	202	0	100.00%
	11. Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	370	493	-123	100.00%
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	45	42	3	93.33%
	13. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	158	757	-599	100.00%
	14. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	181	471	-290	100.00%
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	23	66	-43	100.00%
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	45	52	-7	100.00%
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	5,265	4,777	488	90.73%

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					98.80%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					78.95%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Orang	5,265	5,196	69	98.69%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19.85%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					99.26%	
	1 . Formulir partograf	Formulir	5,256	5,748	-492	100.00%	
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	5,265	5,662	-397	100.00%	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	5,265	5,570	-305	100.00%	
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	202	202	0	100.00%	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	45	42	3	93.33%	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	158	757	-599	100.00%	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	181	474	-293	100.00%	
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	23	63	-40	100.00%	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	45	52	-7	100.00%	
	3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					99.86%
		PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00%
				Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
		A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Orang	5,027	5,154	-127	100.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19.86%		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						99.31%	
1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)		Vaksin	5,027	4,879	148	97.06%	
2 . Vitamin K1 Injeksi		Ampul	5,027	5,655	-628	100.00%	
3 . Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)		Orang	5,027	5,958	-931	100.00%	
4 . Formulir bayi baru lahir		Formulir	5,027	5,344	-317	100.00%	
5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) (sesuai standar 12-59 bulan)		Formulir	15,081	15,772	-691	100.00%	
6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		Buku	5,027	5,333	-306	100.00%	
7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideat dengan rasio 1:885 penduduk)		Paket	202	202	0	100.00%	
8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak		Orang	45	42	3	93.33%	
9 . Tenaga kesehatan : Bidan		Orang	158	757	-599	100.00%	
10 . Tenaga kesehatan : Perawat		Orang	181	473	-292	100.00%	
11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian		Orang	23	64	-41	100.00%	
12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku		Orang	25	44	-19	100.00%	
13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi		Orang	45	47	-2	100.00%	
14 . Kader Kesehatan	Orang	1,960	1,960	0	100.00%		

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
4.	Pelayanan Kesehatan Balita					98.08%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					79.11%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Orang	23,525	23,262	263	98.88%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					18.97%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					94.87%
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	23,525	24,256	-731	100.00%
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	23,525	24,110	-585	100.00%
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	23,525	24,457	-932	100.00%
	4 . Vitamin A Biru	Kapsul	3,366	12,040	-8674	100.00%
	(sesuai standar 6-11 bulan)					
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	35,714	45,098	-9384	100.00%
	(sesuai standar 12-59 bulan)					
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	5,027	15,537	-10510	100.00%
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	5,027	20,156	-15129	100.00%
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	5,027	8,661	-3634	100.00%
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	5,027	16,392	-11365	100.00%
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	5,027	13,066	-8039	100.00%
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	2,624	11,423	-8799	100.00%
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	2,624	11,571	-8947	100.00%
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	61,240	107,411	-46171	100.00%
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	179	113	66	63.13%
	15 . Formula terapi gizi buruk	Paket	84	30	54	35.71%
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	45	42	3	93.33%
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	158	757	-599	100.00%
18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	181	471	-290	100.00%	
19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	45	52	-7	100.00%	
20 . Guru PAUD	Orang	289	371	-82	100.00%	
21 . Kader kesehatan	Orang	1,960	2,051	-91	100.00%	
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					99.58%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Orang	58,193	58,215	-22	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19.58%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					97.92%
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	58193	54042	4151	92.87%
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	431	431	0	100.00%
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	58193	58193	0	100.00%
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	21947	16324	5623	74.38%

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
5.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	7490	7136	354	95.27%
6.	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	904216	952618	-48402	100.00%
7.	Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	23	37	-14	100.00%
8.	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	4059	7127	-3068	100.00%
9.	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	40	49	-9	100.00%
10.	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	6477	14515	-8038	100.00%
11.	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	45	55	-10	100.00%
12.	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	158	757	-599	100.00%
13.	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	181	471	-290	100.00%
14.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	45	54	-9	100.00%
15.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	23	65	-42	100.00%
16.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	73	-50	100.00%
17.	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	557	557	0	100.00%
18.	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	Orang	1960	1960	0	100.00%
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif						99.15%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Orang		234,424	235,446	-1022	100.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)						19.15%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI						95.76%
1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		271	271	0	100.00%
2. Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket		179	191	-12	100.00%
3. Alat : Tensimeter	Unit		179	189	-10	100.00%
4. Alat : Glukometer	Unit		179	140	39	78.21%
5. Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit		23	77	-54	100.00%
6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket		175,717	197,307	-21590	100.00%
7. Alat : KIT IVA Tes	Unit		23	23	0	100.00%
8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit		3,224	15,029	-11805	100.00%
9. Kit Ophthalmologi komunitas	Unit		23	11	12	47.83%
10. Kuesioner PUMA	Dokumen		23	23	0	100.00%
11. Alat Pelayanan KB	Unit		46	75	-29	100.00%
a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit		23	36	-13	100.00%
b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit		23	39	-16	100.00%
c. Vasektomi set	Unit		-	-	0	0.00%

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	23	27	-4	100.00%
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	2,541	2,641	-100	100.00%
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	45	42	3	93.33%
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	158	757	-599	100.00%
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	181	471	-290	100.00%
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	45	52	-7	100.00%
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	74	-51	100.00%
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1,960	1,960	0	100.00%
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					99.07%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					79.17%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Orang	37,657	37,268	389	98.97%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19.90%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					99.49%
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	23	65	-42	100.00%
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	23	67	-44	100.00%
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	23	58	-35	100.00%
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	37,657	78,867	-41210	100.00%
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	37,657	37,657	0	100.00%
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	37,657	37,657	0	100.00%
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	69	-46	100.00%
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	45	42	3	93.33%
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	158	757	-599	100.00%
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	181	471	-290	100.00%
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	45	50	-5	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	72	-49	100.00%
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1,960	1,960	0	100.00%
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					98.69%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					78.80%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Orang	74,460	73,345	1115	98.50%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19.89%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					99.44%
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	179	179	0	100.00%
	2 . Obat Hipertensi	Paket	1,981,831	1,981,831	0	100.00%
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	179	189	-10	100.00%

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	23	23	0	100.00%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	23	45	-22	100.00%
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	45	42	3	93.33%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	158	757	-599	100.00%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	181	471	-290	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	45	52	-7	100.00%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	25	44	-19	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	23	63	-40	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	71	-48	100.00%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					99.89%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Orang	4,688	4,688	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19.89%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					99.44%
	1. Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	826,636	826,636	0	100.00%
	2. Fotometer atau Glukometer	Unit	23	23	0	100.00%
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	56,256	137,333	-81077	100.00%
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	23	23	0	100.00%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	23	23	0	100.00%
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	45	42	3	93.33%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	158	757	-599	100.00%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	181	471	-290	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	23	58	-35	100.00%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	72	-49	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	45	52	-7	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	23	44	-21	100.00%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					98.02%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Orang	926	990	-64	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					18.02%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					90.11%
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	23	24	-1	100.00%

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Paket	211	184	27	87.20%
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	23	23	0	100.00%
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	23	23	0	100.00%
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	23	52	-29	100.00%
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	45	42	3	93.33%
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	23	23	0	100.00%
	8 . Tenaga profesional lainnya	Orang	23	14	9	60.87%
	9 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	23	16	7	69.57%
	11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00%
		Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Orang	7,464	9,174	-1710	100.00%	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	19.91%
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					99.56%	
1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	179	179	0	100.00%	
2 . Reagen Zn TB	Kit	93	352	-259	100.00%	
3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	624	70,237	-69613	100.00%	
4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	23	23	0	100.00%	
5 . Katrid tes cepat molekuler	Tes	5,085	7,606	-2521	100.00%	
6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	23	29	-6	100.00%	
7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	23	37	-14	100.00%	
8 . Tuberkulin	Vial	134	203	-69	100.00%	
9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	45	42	3	93.33%	
10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	181	455	-274	100.00%	
11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	23	64	-41	100.00%	
12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	23	70	-47	100.00%	
13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	23	45	-22	100.00%	
14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	7	11	-4	100.00%	
15 . Kader Kesehatan	Orang	1,960	1,960	0	100.00%	

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					99.87%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)	Orang	6,854	6,877	-23	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.87%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					99.33%
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	23	44	-21	100.00%
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	6,854	8,196	-1342	100.00%
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	6,854	72,684	-65830	100.00%
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	6,854	6,854	0	100.00%
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	45	42	3	93.33%
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	158	758	-600	100.00%
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	181	470	-289	100.00%
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	23	46	-23	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	23	73	-50	100.00%
10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	23	143	-120	100.00%	

B. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Capaian SPM pada setiap pelayanan dasar masih bervariasi; terdapat pelayanan dasar yang belum mencapai target 100%, terdapat pelayanan dasar yang telah mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun 2025. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul pada indikator pelayanan dasar yang belum mencapai target yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil. Capaian pada pelayanan ini belum mencapai target disebabkan karena:
 - a) Masih ada ibu hamil yang abortus, masih ada persalinan prematur dan masih terdapat kasus Kematian Janin dalam Rahim.
 - b) Masih adanya ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya pada trimester I, masih ada ibu hamil yang mencari nafkah diluar daerah, sehingga cakupan K6 tidak bisa terpenuhi, mereka akan kembali kekampung halamannya setelah ibu tersebut ingin melahirkan.
 - c) Di daerah pegunungan dan kepulauan terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan ibu hamil terutama pada daerah terpencil yang tidak bisa terjangkau oleh kendaraan roda dua maupun roda empat
 - d) Masih ada kasus kehamilan yang tidak diinginkan.
 - e) Ada beberapa ibu hamil yang melahirkan diluar wilayah kerja, dengan alasan ingin dekat dengan orang tua atau ingin melahirkan di salah satu RS. Bersalin di Makassar.
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin. Pada indikator pelayanan ini belum juga mencapai target disebabkan karena:
 - a) Masih adanya kasus abortus dan pendarahan pada ibu hamil.
 - b) Adanya warga Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (usia produktif) mencari nafkah di luar daerah (merantau) cukup tinggi dan masih ber KTP Pangkep dimana hamil dan melahirkan di tempat merantau.
- 3) Pelayanan kesehatan balita belum mencapai target disebabkan karena:
 - a) Banyaknya ibu balita yang ikut suami mencari nafkah diluar daerah sehingga berpengaruh dengan jumlah sasaran balita real
 - b) Mobilisasi penduduk yang tidak terakomodir dan adanya perbedaan data kependudukan dimana terdapat penduduk yang bermukim tidak sesuai dengan KTP nya.

- 4) Pelayanan kesehatan pada usia produktif belum mencapai target disebabkan beberapa permasalahan antara lain:
 - a) Masih kurangnya kunjungan usia produktif ke posbindu.
 - b) Tingginya sasaran usia produktif dan kurangnya Kerjasama lintas program dalam melakukan skrining usia produktif..
- 5) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi belum mencapai target disebabkan beberapa permasalahan diantaranya:
 - a) Sasaran yang digunakan adalah sasaran proyeksi yang cukup tinggi
 - b) Kepatuhan Masyarakat untuk pemeriksaan Kesehatan tiap bulan masih rendah terutama jika merasa gejala sudah tidak ada.

b. Solusi

Dari kendala dan permasalahan dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan tahun 2024, akan dilakukan langkah tindak lanjut dalam menangani masalah – masalah tersebut diatas adalah:

- 1). Pelayanan kesehatan ibu hamil akan dilakukan langkah-langkah penyelesaian masalah yaitu :
 - a) Meningkatkan peran bidan dalam pendampingan ibu hamil
 - b) Keterlibatan dan peran aktif kader dalam penemuan dan pemantauan ibu hamil
 - c) Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam hal pendataan sasaran serta adanya kebijakan tentang warga yang merantau wajib melapor dan pindah KK
 - d) Lebih meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin minimal 6 kali selama kehamilan
 - e) Meminta nomor kontak pasien dan menghubungi pasien tersebut apabila tidak melakukan pemeriksaan ataupun melakukan kunjungan rumah
 - f) Pembentukan kelas ibu hamil disetiap posyandu dan melakukan sweeping pada ibu hamil dan keluarga yang tidak ikut ke posyandu
- 2). Pelayanan kesehatan ibu bersalin akan dilakukan langkah-langkah penyelesaian masalah yaitu
 - b) Keterlibatan dan peran aktif kader dalam penemuan dan pemantauan ibu hamil
 - c) Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam hal pendataan sasaran serta adanya kebijakan tentang warga yang merantau wajib melapor dan pindah KK.

- 3) Pelayanan Kesehatan balita, akan dilakukan Langkah-langkah penyelesaian masalah yaitu:
 - a) Melibatkan lintas sektor dan kader untuk mengajak balita utamanya usia 24-59 bulan untuk datang ke posyandu
- 1) Pelayanan kesehatan pada usia produktif, akan dilakukan langkah-langkah penyelesaian masalah yaitu :
 - a). Kolaborasi lintas sektor dan lintas program dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan baik dalam kegiatan posbindu, puskel SIJAGAI, skrining ILP
 - b). Kerjasama lintas program untuk melakukan skrining usia produktif pada saat melakukan kegiatan untuk meningkatkan capaian.
- 2) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, akan dilakukan upaya/langkah-langkah penyelesaian masalah, yaitu:
 - a) Memberdayakan semua SDM yang ada
 - b) Membentuk TIM untuk memantau penderita hipertensi setiap bulannya.
- 3) Untuk mutu yang belum terpenuhi yaitu tenaga medis : dokter maka perlu untuk penambahan tenaga tersebut
- 4) Untuk mutu yang belum terpenuhi lainnya yaitu : Peralatan Anafilaktik, Formula terapi gizi buruk, Form pencatatan/buku rapor kesehatanku, Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah, Alat : Glukometer, Kit Ophthalmologi komunitas dan Penyediaan Psikofarmaka yang belum mencapai 100% maka diperlukan perhatian khusus untuk pemenuhannya dengan mengalokasikan dana dalam pengandaanya.

3.3 Capaian Keuangan

Penyerapan anggaran pada tahun 2025 sebesar 96,67 % dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar terdapat pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Kesehatan (97,29%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan (96,4%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2025 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.53 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kab. Pangkep Tahun 2025

No	Sasaran/Indikator	Anggaran (Rp)		
		Rencana	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
1	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	97,256,738,681	94,501,642,454	97.17
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup)			
	Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran hidup)			
	Prevalensi Stunting			
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang kesehatan	22,926,890,833	22,306,665,520	97.29
	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)			
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan	232,440,095,111	224,066,315,473	96.40
	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan			
Rata - Rata Capaian Keuangan				96.95

Berdasarkan tabel diatas, maka sasaran yang paling tinggi capaian keuangannya adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Kesehatan. Sedangkan yang paling rendah adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan.

3.4 Analisa Efisiensi

Analisa efisiensi dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya pada organisasi Dinas Kesehatan. Tingkat efisiensi diperoleh dari perbandingan antara OUTPUT (Capaian Kinerja) dan INPUT (Capaian Keuangan).

Kriteria Tingkat Efisiensi ada 3 (tiga) yaitu:

- Apabila diperoleh angka Tingkat Efisiensi sebesar 1 (satu), maka penggunaan sumberdaya dalam kategori EFISIEN.
- Apabila diperoleh angka Tingkat Efisiensi DIBAWAH 1 (satu), maka penggunaan sumberdaya masuk dalam kategori TIDAK EFISIEN.
- Apabila diperoleh angka Tingkat Efisiensi sebesar DIATAS 1 (satu), maka penggunaan sumberdaya masuk dalam kategori SANGAT EFISIEN.

Berikut ini tabel hasil analisa efisiensi penggunaan sumberdaya:

Tabel 3.54 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Keuangan (%)	Tingkat Efisiensi	Kategori
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat		120.68	88.97	1.36	Sangat Efisien
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran hidup)	68.63			
		Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran hidup)	225.4			
		Prevalensi Stunting	68			
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang kesehatan		111.38	84.93	1.31	Sangat Efisien
		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	111.38			
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan		106.5	99.13	1.07	Sangat Efisien
		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	106.5			
Tingkat Efisien					1.25	Sangat Efisien

Dari tabel di atas nampak bahwa Tingkat Efisiensi pada Sasaran Strategis ke-1 adalah sebesar 1,36. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumberdaya pada Sasaran Strategis ke-1 masuk dalam kategori Sangat Efisien.

Pada Sasaran Strategis ke-2, Tingkat Efisiensi adalah sebesar 1,31. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumberdaya pada Sasaran Strategis ke-2 juga masuk dalam kategori Sangat Efisien.

Pada Sasaran Strategis ke-3, Tingkat Efisiensi adalah sebesar 1,07. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumberdaya pada Sasaran Strategis ke-3 juga masuk dalam kategori Sangat Efisien.

Adapun tingkat efisiensi rata – rata atau tingkat efisiensi Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 1,25. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumberdaya pada Dinas Kesehatan masuk dalam kategori Sangat Efisien.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2025, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2025 adalah sangat baik dapat dilihat dari Usia Harapan Hidup yang terus meningkat dari tahun ketahun, untuk 5 indikator sasaran strategis, 3 indikator yang mencapai kriteria Sangat Tinggi dan 2 indikator lainnya dengan kriteria Sedang.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2025, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene Dan Kepulauan ke depan yaitu penekanan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Prevelensi Stunting dengan memanfaatkan sumber daya kesehatan, khususnya sumber daya manusia dan anggaran secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan kinerja.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Pangkajene Dan Kepulauan sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

4.2 Saran

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar - benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

LAMPIRAN

Tabel 4.1 REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2025

No	Uraian Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2025			
						Anggaran		Kinerja	
						Rp	%	K	%
DINAS KESEHATAN					352,623,724,625	340,874,623,447	96.67		
I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan				232,440,095,111	224,066,315,473	96.40		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	100	Persen	232,440,095,111	224,066,315,473	96.40	100	100.00
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Data Untuk Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	432,070,600	429,019,600	99.29	100	100.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	250,103,800	247,052,800.00	98.78	3	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26	Dokumen	3,540,900	3,540,900.00	100.00	26	100.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26	Dokumen	3,528,500	3,528,500.00	100.00	26	100.00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	26	Dokumen	5,955,300	5,955,300.00	100.00	26	100.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	26	Dokumen	7,868,400	7,868,400.00	100.00	26	100.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	4,604,500	4,604,500.00	100.00	1	100.00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	140,647,700	140,647,700.00	100.00	1	100.00
8	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	15,821,500	15,821,500.00	100.00	1	100.00

No	Uraian Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2025			
						Anggaran		Kinerja	
						Rp	%	K	%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	123,157,923,254	118,329,180,467	96.08	100	100.00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1361	Orang	121,526,535,054	116,697,894,767.00	96.03	1361	100.00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	1,565,568,000	1,565,568,000.00	100.00	12	100.00
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	Dokumen	65,820,200	65,717,700.00	99.84	12	100.00
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Data Untuk Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah	100	Persen	119,870,100	119,870,100	100.00	100	100.00
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	102,000,200	102,000,200.00	100.00	12	100.00
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	17,869,900	17,869,900.00	100.00	12	100.00
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Persen	514,793,800	507,566,639	98.60	100	100.00
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150	Paket	196,750,000	196,059,908.00	99.65	150	100.00
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	935,500	935,500.00	100.00	12	100.00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Dokumen	414,100	414,100.00	100.00	12	100.00
4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen	144,665,600	139,514,600.00	96.44	4	100.00
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140	Orang	172,028,600	170,642,531.00	99.19	140	100.00
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	1,676,147,971	1,610,674,213	96.09	100	100.00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	6,528,900	6,522,800.00	99.91	10	100.00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24	Paket	388,967,000	387,110,680.00	99.52	24	100.00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	31,014,500	31,005,800.00	99.97	4	100.00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4	Dokumen	1,500,000	1,440,000.00	96.00	4	100.00
5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	40	Laporan	81,933,000	81,916,660.00	99.98	40	100.00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254	Laporan	1,166,204,571	1,102,678,273.00	94.55	254	100.00

No	Uraian Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2025			
						Anggaran		Kinerja	
						Rp	%	K	%
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	6,713,320,100	6,330,314,091	94.29	100	100.00
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17	Unit	6,713,320,100	6,330,314,091	94.29	17	100.00
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	4,484,760,000	4,008,177,740	89.37	100	100.00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	10,970,000	10,970,000.00	100.00	4	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	4	Laporan	352,200,000	310,564,940.00	88.18	4	100.00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Laporan	1,800,000	1,085,600.00	60.31	12	100.00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	4,119,790,000	3,685,557,200.00	89.46	4	100.00
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	Bulan	138,120,100	120,479,981	87.23	100	100.00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18	Unit	115,859,300	98,640,681.00	85.14	18	100.00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20	Unit	17,260,800	16,839,300.00	97.56	20	100.00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	5,000,000	5,000,000.00	100.00	3	100.00
I	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100	Persen	95,203,089,186	92,611,032,642	97.28	100	100.00
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	24	Unit Kerja	95,203,089,186	92,611,032,642.00	97.28	24	100.00

No	Uraian Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2025			
						Anggaran		Kinerja	
						Rp	%	K	%
II	Meningkatnya status kesehatan masyarakat				97,256,738,681	94,501,642,454	97.17		
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	Persen	97,256,738,681	94,501,642,454	97.17	99.45	99.45
A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Puskesmas/rumah Sakit Yang Memenuhi Standar	100	Persen	46,899,591,177	45,643,872,904	97.32	99.65	99.65
1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	Unit	413,515,069	412,051,812.00	99.65	1	100.00
2	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1	Unit	500,000,000	469,014,900.00	93.80	1	100.00
3	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	9	Unit	16,511,325,000	16,212,710,912.00	98.19	9	100.00
4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2	Unit	426,000,000	423,713,386.00	99.46	2	100.00
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Unit	20,000,000	19,993,320.00	99.97	1	100.00
6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	6	Unit	1,592,161,995	1,580,976,941.00	99.30	6	100.00
7	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	4	unit	9,970,963,993	9,580,631,577.00	96.09	4	100.00
8	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	574	Paket	149,471,000	149,460,000.00	99.99	552	96.17
9	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangk	1	Unit	5,000,000,000	4,586,469,490.00	91.73	1	100.00
10	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2	Paket	12,131,325,620	12,028,258,626.00	99.15	2	100.00
11	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	253	Paket	184,828,500	180,591,940.00	97.71	253	100.00

No	Uraian Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2025			
						Anggaran		Kinerja	
						Rp	%	K	%
B	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	100	Persen	50,357,147,504	48,857,769,550	97.02	99.25	99.25
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5265	Orang	1,469,366,000	1,454,740,000	99.00	5115	97.15
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5265	Orang	262,560,000	262,560,000	100.00	5196	98.69
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5027	Orang	27,960,000	26,910,000	96.24	5154	100.00
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23525	Orang	32,850,000	31,630,000	96.29	23262	98.88
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12	Dokumen	6,025,198,000	5,859,562,150	97.25	12	100.00
6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	Dokumen	41,864,494,504	40,567,838,800	96.90	12	100.00
7	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12	Dokumen	674,719,000	654,528,600	97.01	12	100.00
III	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang kesehatan				22,926,890,833	22,306,665,520	97.29		
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	Persen	21,735,206,233	21,130,588,857	97.22	99.89	99.96
A	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	100	Persen	21,629,202,133	21,031,080,757	97.23	99.89	99.89
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58193	Orang	1,094,405,000	1,089,730,000	99.57	58215	100.00
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	234424	Orang	40,525,000	40,105,000	98.96	235446	100.00
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37657	Orang	87,470,000	67,050,000	76.65	37268	98.97
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74460	Orang	39,699,200	38,499,200	96.98	73345	98.50
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4688	Orang	36,186,000	35,986,000	99.45	4688	100.00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	926	Orang	272,034,900	259,954,900	95.56	990	100.00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7464	Orang	450,022,700	448,532,700	99.67	9174	100.00

No	Uraian Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2025			
						Anggaran		Kinerja	
						Rp	%	K	%
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6854	Orang	37,430,700	47,580,700	127.12	6877	100.00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	Dokumen	17,975,700	17,975,700	100.00	12	100.00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	Dokumen	709,916,800	734,056,600	103.40	12	100.00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12	Dokumen	680,024,280	664,921,180	97.78	12	100.00
12	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12	Dokumen	364,324,306	355,350,419	97.54	12	100.00
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	12	Dokumen	24,800,000	24,800,000	100.00	12	100.00
14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12	Dokumen	651,224,900	621,861,100	95.49	12	100.00
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1731	Orang	312,890,000	325,200,000	103.93	1731	100.00
16	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12	Dokumen	3,628,084,500	3,591,450,500	98.99	12	100.00
17	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12	Dokumen	58,186,400	49,034,200	84.27	12	100.00
18	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	12	Dokumen	8,150,184,000	7,821,972,827	95.97	12	100.00
19	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	12	Dokumen	3,760,971,747	3,597,543,449	95.65	12	100.00
20	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	462,128,000	433,514,282	93.81	1	100.00
21	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	346	Orang	5,720,000	4,020,000	70.28	346	100.00
22	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	58	Orang	1,020,000	-	-	58	100.00
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12	Dokumen	343,238,000	341,202,000	99.41	12	100.00
24	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	12	Dokumen	400,740,000	420,740,000	104.99	12	100.00

No	Uraian Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2025			
						Anggaran		Kinerja	
						Rp	%	K	%
B	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	persen	87,168,100	80,764,100	92.65	100	100.00
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12	Dokumen	87,168,100	80,764,100.00	92.65	12	100.00
C	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar	100	persen	18,836,000	18,744,000	99.51	100	100.00
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	1	Unit	18,836,000	18,744,000.00	99.51	1	100.00
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	Persen	725,674,800	714,630,582	98.48	100	100.00
A	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kab/kota	2	Kegiatan	209,250,800	203,443,800	97.22	2	100.00
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen	33,098,000	28,572,000.00	86.33	1	100.00
2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	1	Dokumen	176,152,800	174,871,800	99.27	1	100.00
B	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	1	Kegiatan	516,424,000	511,186,782	98.99	1	100.00
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	120	Orang	516,424,000	511,186,782.00	98.99	120	100.00
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Dan Minuman	100	Persen	296,674,800	286,321,081	96.51	100	100.00
A	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan	1	Kegiatan	69,292,800	69,041,500	99.64	1	100.00
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2	Dokumen	69,292,800	69,041,500.00	99.64	1	50.00

No	Uraian Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Satuan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2025			
						Anggaran		Kinerja	
						Rp	%	K	%
B	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Presentase Pengawasan Sarana Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan IRT	1	Kegiatan	95,822,000	87,530,500	91.35	1	50.00
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan insdutri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	1	Dokumen	95,822,000	87,530,500.00	91.35	1	100.00
C	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Presentase Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100	Persen	131,560,000	129,749,081	98.62	100	100.00
1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	28	Unit	131,560,000	129,749,081.00	98.62	28	100.00
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	Persen	169,335,000	175,125,000	103.42	100	100.00
A	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis Dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Dokumen	169,335,000	175,125,000	103.42	1	100.00
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Dokumen	169,335,000	175,125,000	103.42	1	100.00

